LAKIP

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat limpahan dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini merupakan salah satu bentuk/ media pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan selama tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Bangka Tengah.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang. Terakhir kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten

Bangka Tengah dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Koba, Februari 2025

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

FANI HENDRA SAPUTRA, S.SiT.,M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 198401312006041005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance,* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021 - 2026.

Visi merupakan kondisi atau keadaan yang diharapkan terwujud pada akhir periode perencanaan sesuai dengan sasaran yang dapat dicapai dalam periode tertentu. Visi Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 adalah **"Bangka Tengah yang Semakin Unggul".** Visi tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan yang amanah, bersih dan berwibawa dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan ekonomi kerakyatan. Visi tersebut menekankan pada terwujudnya masyarakat yang makmur/sejahtera. Masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bangka Tengah adalah potret dari masyarakat yang selama ini belum memiliki standar rumah yang layak huni, salah satu pemicunya adalah kondisi sosial ekonomi mereka jauh dari berkecukupan. Dan juga selama ini akses mereka terhadap transportasi umum sangat kurang karena keterbatasan kemudahan yang mereka terima dari ketersediaan angkutan umum yang ada saat ini. Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, maka akses

masyarakat dalam transportasi harus dibuka lebar-lebar dengan berbagi program dan kegiatan, sehingga masyarakat mampu menerima manfaat ekonomis dari keberadaan transportasi sebagai alat angkut orang maupun barang.

Misi merupakan pernyataan tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi pembangunan kehutanan di Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 tersebut, misi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK; Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata; Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan; dan Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul. Pernyataan misi tersebut menunjukkan keinginan Kabupaten Bangka tengah dengan mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan misi tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dapat berdaya dan sejahtera serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Strategi pembangunan tersebut menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif melalui proses pemberdayaan masyarakat. Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan dan Permukiman di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 dengan alat ukur indikator kinerja adalah sebagi berikut:

a. Presentase warga negara korban bencana / warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, dengan target kinerja sebesar 100,00%.
b. Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani, dengan target kinerja sebesar 30,18 Ha.
c. Presentase Rumah Layak Huni, dengan target kinerja sebesar 97,50%.
d. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU, dengan target kinerja sebesar 68,29%.
e. Rasio Kejadiaan Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan, dengan target kinerja sebesar 33 (Rasio).
f. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi, dengan target kinerja sebesar 80,00 (Nilai).
g. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas perumahahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan target kinerja sebesar 82,00 (Nilai).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 3

1.3. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6

1.4. LANDASAN HUKUM 7

1.5. SISTEMATIKA 9

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA **10**

2.1. RENCANA STRATEGIS 10

2.1.1. Visi 11

2.1.2. Misi 111

2.1.3. Tujuan dan Sasaran 12

2.1.4. Indikator Kinerja Utama 14

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2024 17

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 18

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA **36**

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 37

3.2. REALISASI ANGGARAN 95

3.3. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 104

BAB 4 PENUTUP **122**

LAMPIRAN **125**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah 153
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah 15
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah..... 17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah..... 19
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024..... 20
Tabel 2.6 Rencana Kerja Tahunan Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah 28
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah 29
Tabel 2.8 Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 30
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja..... 37
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 38
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 56
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis..... 65
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota lain..... 68
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 72
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan..... 86
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan..... 97
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 104
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah 5
Gambar 3.1 Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Tahun 2024 41
Gambar 3.2 Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Tahun 2024 44
Gambar 3.3 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2024..... 46
Gambar 3.4 Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2024..... 48
Gambar 3.5 Rasio Kejadiaan Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan Tahun 2024 50
Gambar 3.6 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2024 52
Gambar 3.7 Nilai akuntabilitas kinerja Tahun 2024 55
Gambar 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 58

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme regulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali *(controllable activities)* dengan kegiatan yang tidak terkendali *(uncontrollable activities)*. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKIP Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran, disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah, menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas kepada Bupati telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah maka dibentuklah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Sesuai Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 103 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut :

A. TUGAS

Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah: melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

B. FUNGSI

Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 103 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, ditetapkan **Struktur Organisa**si Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, terdiri atas ;
    1. Sekretariat, membawahkan :
        1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
        2. Subbagian Perencanaan.
    2. Bidang Perhubungan, membawahkan :
        1. Seksi Lalu Lintas; dan
        2. Seksi Angkutan.
    3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; serta
    5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

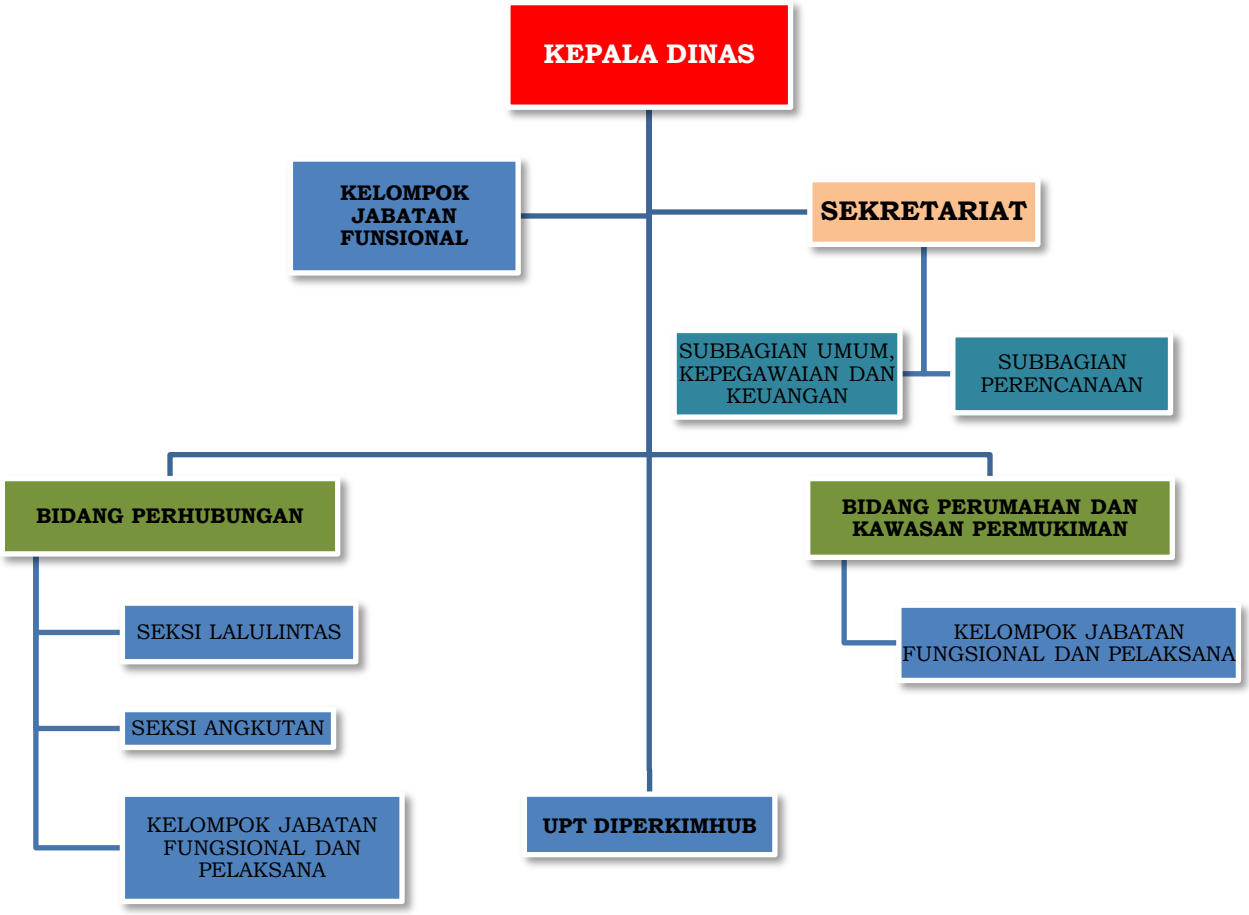

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah

I.3 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021—2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
2. Keterbatasan infrastruktur perhubungan

Perumusan Isu strategis pada tahun 2026 mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021—2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis/isu-isu penting yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber daya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa kegiatan relokasi penduduk di Desa Kurau Barat dan Desa Kurau Timur.
2. Belum optimalnya ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum
3. Kondisi gedung Diperkimhub yang sebagian besar dalam kondisi rusak mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras sehingga menggangu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan
5. Sistem drainase yang kurang baik sehingga sangat menggangu kenyamanan dan keamanan warga
6. Belum adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Bangka Tengah.
7. Belum tersedia terminal tipe C di Kabupaten Bangka Tengah.

8. Pendataan geolokasi aset selain alat penerangan jalan (APJ) milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan belum tertata dengan baik.

I.4 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026;
15. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1287);
16. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 103 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1256);

I.5 SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 disusun dengan tata urut penulisan sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Meliputi Latar Belakang, Tugas Dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

Bab 2 **Perencanaan Kinerja**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

Bab 3 **Akuntabilitas Kinerja**

Meliputi Capaian Iku, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

Bab 4 **Penutup**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 (BD 1099), tertanggal 24 September 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

II.1.1 VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas**.** Dalam Renstra 2021-2026 disebutkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah**: “”Mewujudkan Bangka Tengah Yang Semakin Unggul”.**

II.1.2 MISI

Untuk mewujudkani visi tersebut, misi yang diusung adalah **:**

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan IMTAQ;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan; dan
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada Misi ke-tiga, yaitu :

“**Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata**”.

II.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk mengimplementasikan misi di atas, maka ditetapkan tujuan untuk kurun waktu 2021-2026. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan yang Berkualitas.
3. Peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin handal

B. SASARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah pada akhir periode Renstra tahun 2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2026 sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Indikator
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Tengah

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	**Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	1.	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	24,18 Ha	26,18 Ha	28,18 Ha	30,18 Ha	32,18 Ha	35,82 Ha
		3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	96,10 %	96,49 %	96,89 %	97,50 %	97,68 %	98,08 %
		4.	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	53,66 %	58,54 %	63,41 %	68,29 %	73,17 %	78,05 %
2.	**Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan Yang Berkualitas**	5.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan		35,00 Rasio	34,00 Rasio	33,00 Rasio	32,00 Rasio	31,00 Rasio
3.	**Peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Handal**	6.	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	70 Nilai	75 Nilai	78 Nilai	80 Nilai	82 Nilai	85 Nilai
		7.	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	70 Nilai	75 Nilai	78 Nilai	80 Nilai	82 Nilai	85 Nilai
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik		80,00 Nilai)	81,00 Nilai)	82,00 Nilai)	83,00 Nilai)	84,00 Nilai)

II.1.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 berdasarkan Perubahan Renstra tahun 2021-2026 pada tahun 2023 ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	1.1	Persentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	Menunjukkan pemenuhan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana dan rumah tangga penerima layanan yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani dan rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penenerima layanan}} \times 100\%$	Laporan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat
2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	2.1	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	Menunjukkan luas penanganan kawasan permukiman kumuh	Luas permukiman kumuh yang sudah tertata + Luas permukiman kumuh di tahun n yang akan ditata	Baseline Kawasan Permukiman Kumuh
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	3.1	Persentase rumah layak huni	%	Menunjukkan peningkatan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100\%$	Laporan Tahunan Penyediaan Rumah Layak Huni
4.	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	4.1	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	Menunjukkan peningkatan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	$\frac{\text{Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah seluruh perumahan di Kabupaten Bangka Tengah}} \times 100\%$	Laporan Tahunan Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
							Permukiman
5.	Meningkatnya keselamatan transportasi	5.1	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	Menunjukkan peningkatan keselamatan transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Angkutan Jalan (Angkutan Darat dan Angkutan Laut/Sungai). Rasio tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021.	Satlantas Polres Bangka Tengah, Terminal
6.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan	6.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Nilai	Menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021.	Kuesioner Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	7.1	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Nilai	Menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah	Hasil Evaluasi SAKIP

III.1.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Rencana Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ditampilkan sebagai berikut :

Tabel II.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			Persentase kepemilikan rumah layak huni	%	87,49
		1.1	Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
		1.2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	30,18
		1.3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	%	97,29
		1.4	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	68,29
2	Tersedianya infrastruktur bidang perhubungan yang berkualitas			Jumlah arus penumpang angkutan	Orang/Tahun	2.000.000
		2.1	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	33

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		2.2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Nilai	80
3	Peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin handal			Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Predikat	Baik
		3.1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Persentase kualitas pelayanan publik yang didukung akuntabilitas kinerja	Nilai	82

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024

II.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 03 Januari 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana ditampilkan sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1.	Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	1.1	Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	2.1	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	30,18
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	3.1	Persentase rumah layak huni	%	97,29
4.	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	4.1	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	68,29
5.	Meningkatnya keselamatan transportasi	5.1	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	33
6.	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	6.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Nilai	80
7.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	7.1	Persentase kualitas pelayanan publik yang didukung akuntabilitas kinerja	Nilai	82

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 :

Tabel II.5
Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Jumlah angka backlog perumahan**	**500 Unit**	**Rp.18.715.785.000**
		Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	**100%**	
I.1.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah kecamatan yang teridentifikasi berada dalam kawasan rawan bencana alam dan relokasi program pemerintah kabupaten kota**	**6 Kecamatan**	Rp. 23.000.000
I.1.1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Lokasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan yang teridentifikasi	1 Dokumen	Rp5.000.000
I.1.2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	Rp5.000.000
I.1.3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	Rp3.000.000
I.1.4	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	Rp2.500.000
I.1.5	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen	Rp5.000.000
I.1.6	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	Rp2.500.000
I.2.	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah paket kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota**	**1 Paket**	Rp18.672.785.000
I.2.1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	119 Unit rumah	Rp18.672.785.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
I.3.	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah bulan terlaksananya perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan**	**12 Bulan**	Rp20.000.000
I.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	Rp20.000.000
II	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (di bawah 10 Ha)**	58,65	Rp140.000.000
II.1	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah bulan terlaksananya perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**12 Bulan**	Rp20.000.000
II.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	Rp20.000.000
II.2	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata dan tertangani**	**2 Ha**	Rp95.000.000
II.2.1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	Rp75.000.000
II.2.2	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Rp20.000.000
II.3	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat**	**2 Kawasan**	Rp25.000.000
II.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 laporan	Rp20.000.000
II.3.2	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Rp5.000.000
III	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani**	**34,69**	-
II.1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota**	**-**	**-**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
II.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang diperbaiki	-	--
IV	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum**	**62,36**	Rp 846.810.000
IV.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan**	**2 Kegiatan**	Rp846.810.000
IV.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU perumahan yang disediakan untuk menunjang fungsi hunian Jumlah Lokasi Pekuburan/pemakaman yang ditingkatkan/ditata fasilitas PS	8 Lokasi	**811.810.000**
IV.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1 Laporan	Rp20.000.000
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	Rp15.000.000
V	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya**	**80**	**10.304.400.000**
V.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**20.000.000**
V.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	**15.000.000**
V.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	**5.000.000**
V.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	Rp3.674.500.000
V.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	Rp3.664.500.000
V.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp5.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
V.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp5.000.000
V.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**10.000.000**
V.3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	**5.000.000**
V.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	**5.000.000**
V.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**15.400.000**
V.4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	**15.400.000** -
V.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	Rp238.500.000
V.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	**4.000.000**
V.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	**40.000.000,**
V.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	**30.000.000**
V.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	**61.500.000**
V.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	**3.000.000,**
V.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 Bulan	Rp100.000.000
V.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**
V.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-
V.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-
V.7	**Penyediaan Jasa**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan**	**12 Bulan**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**492.000.000**
V.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan	**150.000.000**
V.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	**100.000.000**
V.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	**242.000.000**
V.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	Rp5.854.000.000
V.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	**74.000.000**
V.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Rp5.760.000.000
V.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	**20.000.000**
V.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	130 m^2	
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kinerja lalu lintas kabupaten**	**0,19 Nilai**	**3.155.600.000**
VI.1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan**	**260 Unit**	Rp2.426.000.000
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	Rp130.000.000
VI.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah unit perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan	260 Unit	Rp1.284.000.000
VI.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah bulan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	12 Bulan	Rp1.012.000.000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**-**	**-**
	Penyusunan Rencana	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C			
VI.2	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan**	**1 Kegiatan**	**76.000.000**
VI.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	**76.000.000**
VI.3	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala**	**3400 Kali Uji**	Rp309.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	50.000.000
VI.3.1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan kegiatan registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	12 Bulan	89.000.000
VI.3.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300 Dokumen	Rp40.000.000
VI.3.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang dipelihara	12 Bulan	100.000.000
VIII.3.5	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	20 laporan	Rp30.000.000
VI.4	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan**	**Jumlah kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan**	**2 Kegiatan**	**Rp215.000.000**
VI.4.1	Pembangunan Zona Selamat Sekolah ZOSS	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1 unit	Rp175.000.000
VI.4.2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	40.000.000
VIII.5	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan dalam merumuskan persetujuan hasil Andalalin untuk jalan kabupaten**	**2 Kegiatan**	**Rp91.000.000**
VI.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	50 laporan	Rp30.000.000
VI.5.1	Pengawasan Pelaksanaan	Jumlah laporan rekomendasi Andalalin	60 laporan	Rp61.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Rekomendasi Andalalin	yang terawasi		
VI.6	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan**	**1 Kegiatan**	Rp38.600.000
VI.6.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten yang dilaksanakan	1 laporan	**38.600.000**
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase izin usaha angkutan laut yang diterbitkan sesuai kewenangan kabupaten**	**30%**	**10.000.000,00**
VII.1	**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten**	**1 Kegiatan**	**10.000.000,00**
VII.1.1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten yang dilaksanakan	1 Kegiatan	**10.000.000,00**

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan/atau
c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 03 Oktober 2024 dilaksanakan Perubahan Rencana Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama yang disebabkan oleh adanya indikator yang sudah melebihi target sesuai dengan SK Perubahan IKU tahun 2024 s.d 2026 Nomor : 188.47/09/ DIPERKIMHUB/2024 tanggal 02 September 2024.

Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024 ditampilkan pada sebagai berikut :

Tabel II.6
Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	**Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**			**Persentase kepemilikan rumah layak huni**	**%**	**87,49**
		1.1	Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
		1.2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	30,18
		1.3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	%	**97,50**
		1.4	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	68,29
2	**Tersedianya infrastruktur bidang perhubungan yang berkualitas**			**Jumlah arus penumpang angkutan**	**Orang/Tahun**	**2.000.000**
		2.1	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	33
		2.2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Nilai	80
3	**Peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin handal**			**Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan**	**Predikat**	**Baik**
		3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Nilai	82

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 ditampilkan pada sebagai berikut :

Tabel II.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1.	Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	1.1	Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	2.1	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	30,18
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	3.1	Persentase rumah layak huni	%	**97,50**
4.	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	4.1	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	68,29
5.	Meningkatnya keselamatan transportasi	5.1	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	33
6.	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	6.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Nilai	80
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	7.1	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Nilai	82

Rincian program dan kegiatan sesuai dengan Perubahan Rencana Kinerja Perubahan dan Indikator KInerja Utama Perubahan tahun 2024 ditampilkan sebagai berikut :

Tabel II.8
Program dan Kegiatan Perubahan 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Tengah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Jumlah angka backlog perumahan**	**500 Unit**	**17.106.165.105**
		Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	**100%**	
I.1.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah kecamatan yang teridentifikasi berada dalam kawasan rawan bencana alam dan relokasi program pemerintah kabupaten kota**	**6 Kecamatan**	**9.971.500**
I.1.1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Lokasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan yang teridentifikasi	1 Dokumen	**3.171.500**
I.1.2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	**1.800.000**
I.1.3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen	5.000.000,00
I.2.	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota**	**119 Unit rumah**	**17.063.643.605**
I.2.2	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	11 9 Unit rumah	**17.063.643.605**
I.3.	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah bulan terlaksananya perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan**	**12 Bulan**	**32.550.000**
I.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	**32.550.000**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Perumahan			
II	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (di bawah 10 Ha)**	**58,65**	**119.853.500**
II.1	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah bulan terlaksananya perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**12 Bulan**	**30.860.000**
II.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	**30.860.000**
II.2	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata dan tertangani**	**2 Ha**	**63.993.500**
II.2.1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	**60.896.000**
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	**3.097.500**
II.3	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat**	**2 Kawasan**	**25.000.000**
II.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 laporan	**25.000.000**
III	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani**	**34,69**	**-**
II.1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota**	**1 Kegiatan**	**-**
II.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang diperbaiki	-	-
IV	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM**	**Persentase peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum**	**62,36**	**842.435.000**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	(PSU)			
IV.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan**	**2 Kegiatan**	**842.435.000**
IV.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU perumahan yang disediakan untuk menunjang fungsi hunian Jumlah Lokasi Pekuburan/pemakaman yang ditingkatkan/ditata fasilitas PS	8 Lokasi	**811.810.000**
IV.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1 Laporan	**18.211.500**
V	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya**	**80**	**10.252.671.360**
V.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**20.000.000**
V.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	**15.000.000,**
V.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	**5.000.000,**
V.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**3.776.771.360**
V.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	**3.770.121.360**
V.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	**1.650.000**
V.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	**5.000.000**
V.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**10.000.000**
V.3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	**5.000.000**
V.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	**5.000.000**
V.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**12 Bulan**	**15.400.000**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Daerah		
V.4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	**15.400.000** -
V.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**288.500.000**
V.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	**4.000.000**
V.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	**40.000.000,**
V.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	**30.000.000**
V.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	**61.500.000**
V.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	**3.000.000,**
V.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 Bulan	150.000.000
V.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**
V.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**492.000.000**
V.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan	**150.000.000**
V.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	**100.000.000**
V.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	**242.000.000**
V.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**5.650.000.000**
V.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	**74.000.000**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
V.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	**5.556.000.000**
V.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	**20.000.000**
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kinerja lalu lintas kabupaten**	0,19 Nilai	**2.348.540.000**
VI.1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan**	**260 Unit**	**1.846.920.000**
VI.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah unit perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan	260 Unit	**659.500.000**
VI.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah bulan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	12 Bulan	**1.187.420.000**
VI.2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	1 Dokumen	**-**
VI.2.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	-
VI.3	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan**	**1 Kegiatan**	**76.000.000**
VI.3.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	**76.000.000**
VI.4	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala**	**3400 Kali Uji**	**285.980.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	50.000.000
VI.4.1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan kegiatan registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	12 Bulan	89.000.000
VI.4.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300 Dokumen	22.500.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Kendaraan Bermotor			
VI.4.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang dipelihara	12 Bulan	100.000.000
VIII.4.5	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	20 laporan	24.480.000,
VIII.5	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan**			**40.000.000**
VI.5.1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**1 laporan**	**40.000.000**
VI.6	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan dalam merumuskan persetujuan hasil Andalalin untuk jalan kabupaten**	**2 Kegiatan**	**61.040.000**
VI.6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	50 laporan	30.000.000
VI.6.2	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi Andalalin yang terawasi	60 laporan	**31.040.000**
VI.7	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan**	**1 Kegiatan**	**38.600.000**
VI.7.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten yang dilaksanakan	1 laporan	**38.600.000**
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase izin usaha angkutan laut yang diterbitkan sesuai kewenangan kabupaten**	**75%**	**10.000.000,00**
VII.1	**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten**	**1 Kegiatan**	**10.000.000,00**
VII.1.1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten yang dilaksanakan	1 Kegiatan	**10.000.000,00**

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel III.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

(Sumber:Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja

utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukan hasil sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel** III.2. sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
1.	Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana/ warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Baik	Laporan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat
2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	30,18 Ha	33,22 Ha	110,07 %	Sangat Baik	Baseline Kawasan Permukiman Kumuh
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	97,50%	98,21%	100,73 %	Sangat Baik	Laporan Tahunan Penyediaan Rumah Layak Huni
4.	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	68.29%	65,85%	96,43%	Sangat Baik	Laporan Tahunan Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	33,00 Rasio	56,30	58,93%	Rendah	Satlantas Polres Bangka Tengah, Terminal Pangkalpinang dan Toboali
6.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	80,00 (Nilai)	78,50 (Nilai)	97,56 %	Sangat Baik	Kuesioner Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	82,00 (Nilai)	76,67	93,50	Sangat Baik	Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

Adapun rincian analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2024 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan kabupaten Bangka Tengah telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Adapun rincian analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

A. Tujuan I : Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Ket
			2024				
.1.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase Warga Negara Korban Bencana/Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	100%	100%	100%	Sangat Baik	IKU
.2.	Meningkatnya Luasan Kawasan Kumuh Yang Ditangani	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	30,18 Ha	33,22 Ha	110,07%	Sangat Baik	IKU

.3.	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	97,50%	98,21%	100,73%	Sangat Baik	IKU
.4.	Meningkatnya Penyediaan Psu Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Psu	68,29%	65,85%	96,43%	Sangat Baik	IKU

Tujuan Pertama Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, mempunyai **4 (empat) sasaran dan 4 (empat) sasaran indikator** antara lain **:**

1. **Sasaran pertama :** Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat

   Indikator Kinerja : Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

   Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

   Salah satu sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yaitu terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat. Pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat dalam hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu :

   1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan
   2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

   Sasaran dan indikator pada pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat mengadopsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan

   Perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran pertama dapat digambarkan dengan gambar berikut :

Gambar 3.1
Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
Tahun 2024

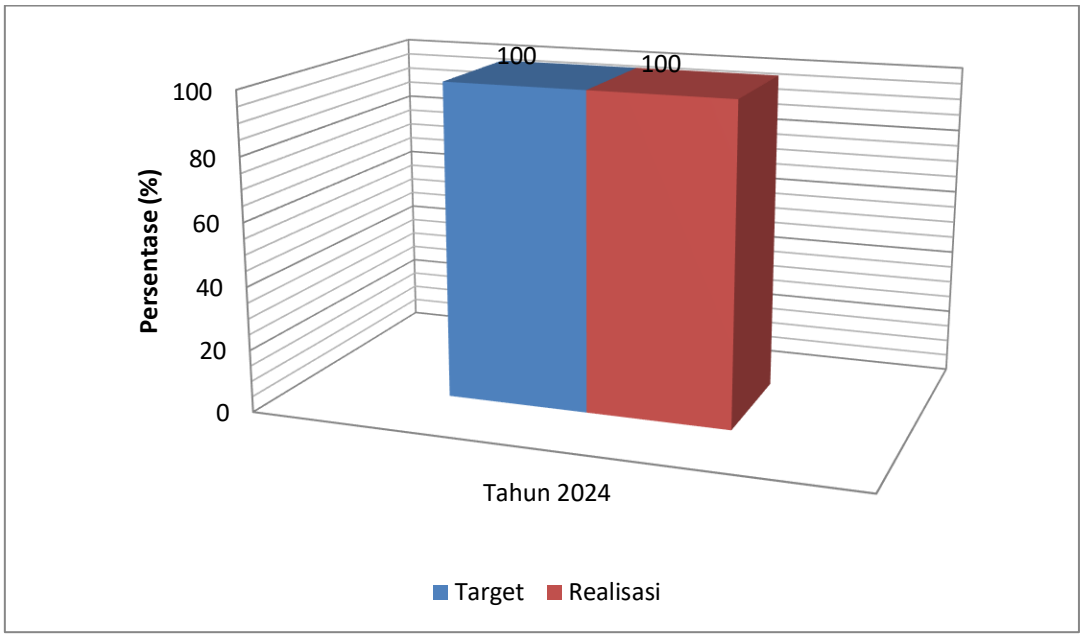

Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2025

Rumus perhitungan :

Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	=	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana dan rumah tangga penerima layanan yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani dan rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penenerima layanan}} \times 100\%$

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dan capaian 100%. Capaian 100% pada Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni pada tahun 2024 dihitung berdasarkan **pembangunan unit rumah layak huni** bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit rumah yang berada di sempadan sungai yang direlokasi, yaitu :

- Desa Kurau Barat sebanyak 2 (dua) titik lokasi yang terdiri dari 85 (delapan puluh lima) unit rumah ; dan

- Desa Kurau sebanyak 1 (satu) lokasi yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) unit rumah.

Pelaksanaaan pembangunan rumah layak huni pada tahun 2024 ini merupakan langkah awal pengentasan permukiman kumuh terpadu Kabupaten Bangka Tengah yang telah mendapatkan dukungan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK Tematik PPKT) Tahun Anggaran 2024 serta dukungan dana APBD Kabupaten Bangka Tengah untuk pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang merupakan kegiatan tindak lanjut dari pelaksanaan capaian kegiatan pada tahun 2023 yaitu pematangan lahan untuk pembangunan 119 unit rumah yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bangka Tengah.

2. **Sasaran kedua** **:** Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani

Indikator Kinerja : Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani, Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Undang-Undang 1 tahun 2011 menyatakan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan kewajiban Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak.

Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Pola penanganan meliputi :

1. Pemugaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni;
2. Peremajaan, yaitu kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; atau

3. Pemukiman Kembali, yaitu kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. Pola penanganan diterapkan terhadap fisik infrastruktur meliputi :
   1) Bangunan gedung;
   2) Jalan lingkungan;
   3) Penyediaan air minum;
   4) Drainase lingkungan;
   5) Pengelolaan air limbah;
   6) Pengelolaan persampahan; dan
   7) Proteksi kebakaran.

   Pola penanganan secara non fisik berupa rekomendasi terkait beberapa aspek, yaitu:
   1) Bangunan dan lingkungan;
   2) Drainase lingkungan;
   3) Penyediaan air minum;
   4) Pengelolaan air limbah;
   5) Pengelolaan persampahan;
   6) Potensi ekonomi lokal;
   7) Status lahan;
   8) Partisipasi penanganan;
   9) Pemukiman kembali; dan
   10) Pengelolaan. Jumlah seluruh luasan dan lokasi kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai acuan target rencana penanganan kawasan permukiman kumuh.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh atau RP2KPKPK, yang meliputi seluruh kawasan permukiman yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/152/DISPERKIMHUB/2022 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Bangka Tengah. Tiga kawasan tersebut yaitu Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru dengan luas 9,62 hektar. Kawasan Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan seluas

4,02 hektar. Dan Kawasan Kurau, Kecamatan Koba yang terdiri dari Desa Kurau dan Desa Kurau Barat dengan luas 20,10 hektar.

Gambar 3.2
Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Tahun 2024

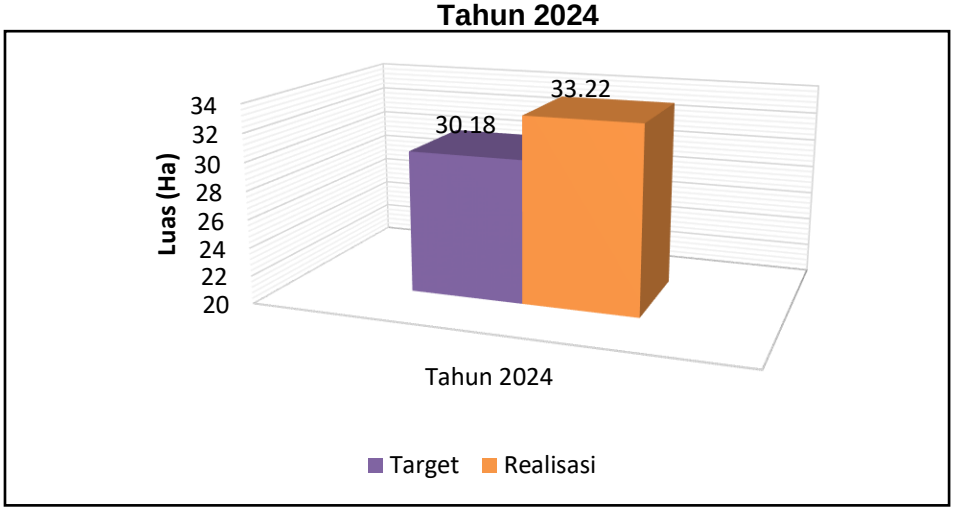

Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2025

Rumus perhitungan :

Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	=	*Luas permukiman kumuh yang sudah tertata + Luas permukiman kumuh di tahun n yang akan ditata*

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 30,18 Ha. Pelaksanaan pada tahun 2024 yaitu penanganan kawasan kumuh di Desa Batu Belubang seluas 0,75 Ha, Desa Kelurahan Sungaiselan seluas 1,98 Ha, dan Desa Kurau seluas 0,55 Ha sehingga jumlah luas penanganan kawasan kumuh pada tahun 2024 adalah 3,28 Ha. Luas penanganan kawasan kumuh yang telah ada pada tahun 2024 sebesar 3,28 Ha dijumlahkan dengan akumulasi luas penanganan kawasan kumuh pada tahun 2023 sebesar 29,4 Ha sehingga mendapatkan realisasi sasaran sebesar 33,22 Ha atau dengan capaian sebesar 110,07 % dari target atau dapat diinterpesentatifkan sasaran pada indikator ini tercapai.

3. **Sasaran ketiga : Meningkatnya jumlah rumah layak huni** dengan Indikator Kinerja **Persentase Rumah Layak Huni.**

Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus sarana membina keluarga. Rumah menjadi hak dasar yang harus dipenuhi sesuai kriteria standar agar layak untuk dihuni. Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang belum mempunyai rumah layak huni khususnya bagi kelompok masyarakat miskin.

Masyarakat miskin mempunyai keterbatasan akses terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak baik secara keterjangkauan maupun aksesibilitas. Jangankan untuk membeli rumah, pendapatan yang rendah ini saja tak jarang belum mampu mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari. Hal ini mengakibatkan semakin sulitnya menjangkau harga rumah. Masyarakat miskin juga terkendala akses perbankan karena pendapatan yang tidak tentu tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mencicil rumah.

Hak atas perumahan telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD RI 1945, UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pasal 40 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Seluruh aturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang, termasuk masyarakat miskin, berhak bertempat tinggal di rumah yang layak dengan harga terjangkau dimana negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam rangka memenuhi amanat tersebut Diperkimhub Kabupaten Bangka Tengah melakukan strategi untuk terus meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Bangka Tengah yaitu baik dengan pembangunan baru rumah layak huni melalui dana APBD maupun dengan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang di dana oleh APBN.

Gambar 3.3
Persentase Rumah Layak Huni
Tahun 2024

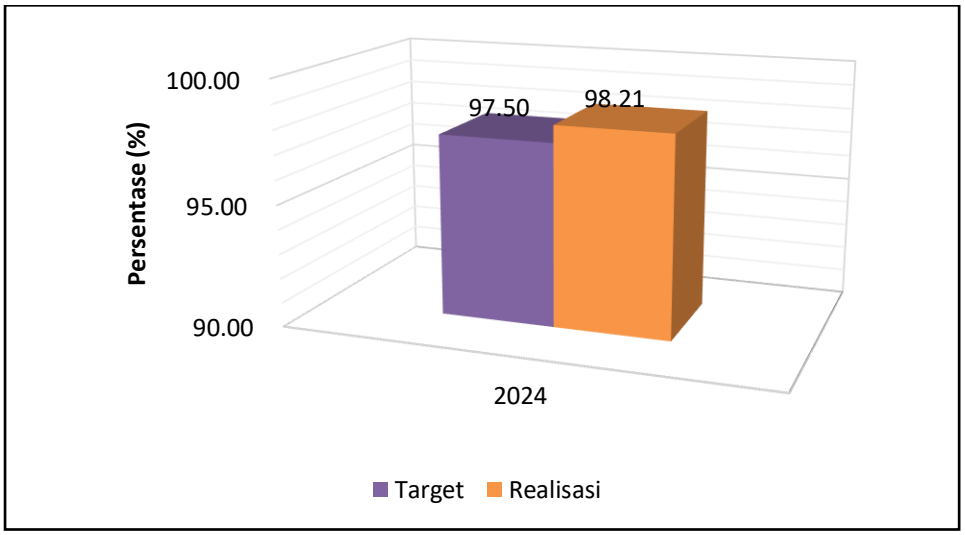

Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2025

Rumus perhitungan :

Persentase Rumah Layak Huni = $\frac{Jumlah\ rumah\ layak\ huni}{Jumlah\ kepala\ keluarga} \times 100\%$

Pada tahun 2024, target sasaran tersebut adalah sebesar 97,50%. dengan realisasi sebesar 98,21%. Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan, besar capaian sasaran ini adalah 100,73%.

Perhitungan realisasi capaian 2024 berdasarkan divisi dari akumulasi jumlah rumah layak huni sampai dengan tahun 2024 dibagi jumlah kepala keluarga pada tahun 2024 sebesar 59.532 kepala keluarga dikalikan 100 persen yaitu akumulasi rumah layak huni sampai dengan awal 2024 sebanyak 58.044 rumah layak huni ditambah dengan jumlah pembangunan rumah layak huni pada tahun 2024 sebanyak 424 rumah layak huni yang terdiri dari 119 unit rumah layak huni berdasarkan program kegiatan Diperkimhub yang bersumber dari dana DAK dan APBD dan terdapat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang bersumber dari dana APBN melalui Kegiatan Bantuan Stimulai Perumahan Swadaya (BSPS) Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

sebanyak 305 unit yang dilaksanakan di Desa Namang sebanyak 60 unit dan Desa Lubuk Besar sebanyak 245 unit.

4. **Sasaran keempat : Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman** dengan Indikator Kinerja **Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU.** Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman..

Penyediaan atau bantuan PSU adalah pemberian sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional. (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Dalam Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, fasilitas umum maupun fasilitas sosial masih dikategorikan dalam prasarana, yang merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Serta, dapat pula sebagai sarana, yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- Komponen bantuan PSU untuk rumah tapak meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen : jalan; drainase; air limbah;persampahan;air minum; dan penerangan jalan umum.

- Komponen bantuan PSU untuk rusun sewa meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen : jalan; drainase; air limbah; persampahan; air minum; penerangan jalan umum; dan tempat parkir.

Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah berperan sebagai pengelola PSU di Kabupaten Bangka Tengka Tengah sesuai UU 1/2011 yang menyebutkan bahwa pengelolaan PSU kawasan perumahan menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu pendataan PSU perlu dilakukan karena dapat memperoleh informasi terkait ketersediaan dan kondisi PSU di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. Pendataan PSU yang dilaksanakan secara rutin akan mendukung terciptanya sistem pelaporan yang berkelanjutan, tepat waktu, lengkap, dan akurat .

Gambar 3.4
Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2024

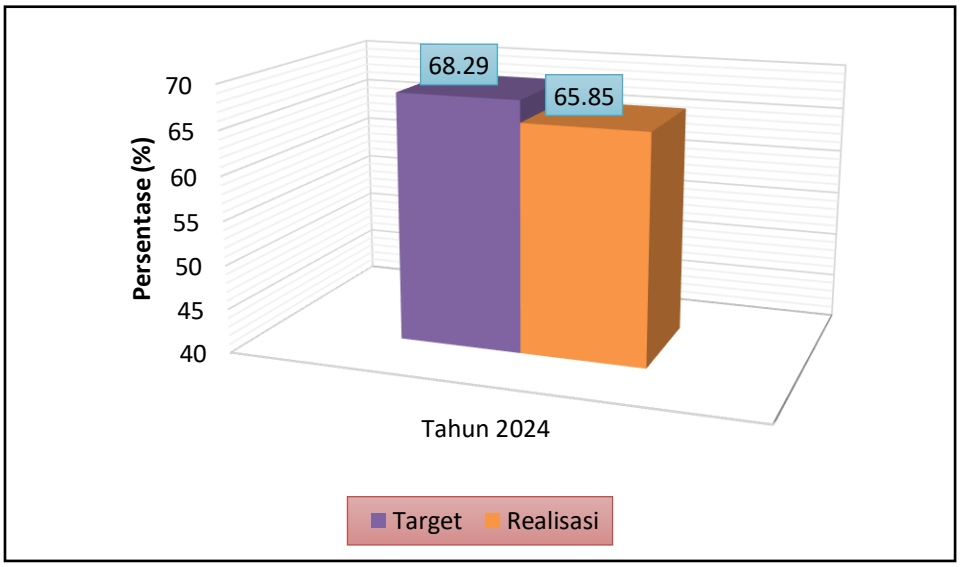

Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2025

Rumus perhitungan :

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	=	$\frac{Jumlah\ perumahan\ yang\ terfasilitasi\ PSU}{Jumlah\ seluruh\ perumahan\ di\ Kabupaten\ Bangka\ Tengah} \times 100\%$

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 68,29% dengan realisasi sebesar 65,85%. Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan, besar capaian sasaran ini adalah 96,43%. Capaian tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan pada tahun 2024 Diperkimhub Bangka Tengah **tidak**

mendapatkan bantuan Pembangunan PSU Perumahan MBR berupa jalan paving blok yang bersumber dari dana APBN melalui kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Tujuan II : Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan Yang Berkualitas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
			2024	2024	2024	
5.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadiaan Kecelakaan Transportasi Per 10 Ribu Keberangkatan	3,00 Rasio)	5 6,30 (Rasio)	5 8,61 %	KU
6.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	0,00 (Nilai)	7 8,50 (Nilai)	9 8,125%	KU

Tujuan Kedua Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan yang Berkualitas, mempunyai **2 (dua) sasaran dan 2 (dua) sasaran indikator antara lain :**

5. **Sasaran kelima : Meningkatnya keselamatan transportasi** dengan Indikator Kinerja **Rasio Kejadiaan Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan.**

Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam rangka pencapaian keselamatan dan keamanan transportasi telah dirumuskan beberapa langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas angkutan jalan diantaranya adalah dengan melakukan pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan, pelaksanaan giat monitoring dan penegakan hukum tertib berlalu lintas serta pelaksanaan sosialisasi tertib berlalu lintas untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas.

Sebagai bahan perhitungan nilai indikator ini Diperkimhub bekerjasama dengan pihak eksternal/luar seperti Polres Kabupetan Bangka Tengah untuk data angka kecelakaan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang sebagai sumber data jumlah keberangkatan angkutan umum dikarenakan sampai dengan saat ini Kabupaten Bangka Tengah masih belum memiliki terminal angkutan umum.

Untuk perhitungan indikator ini, kinerja akan semakin baik apabila nilai realisasi semakin turun.

Rumus perhitungan :

Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	$\frac{Jumlah\ kejadian\ kecelakaan\ lalu\ lintas}{Jumlah\ keberangkatan\ angkutan\ umum} : \frac{1}{10.000}$

(sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021)

Gambar 3.5
Rasio Kejadiaan Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan Tahun 2024

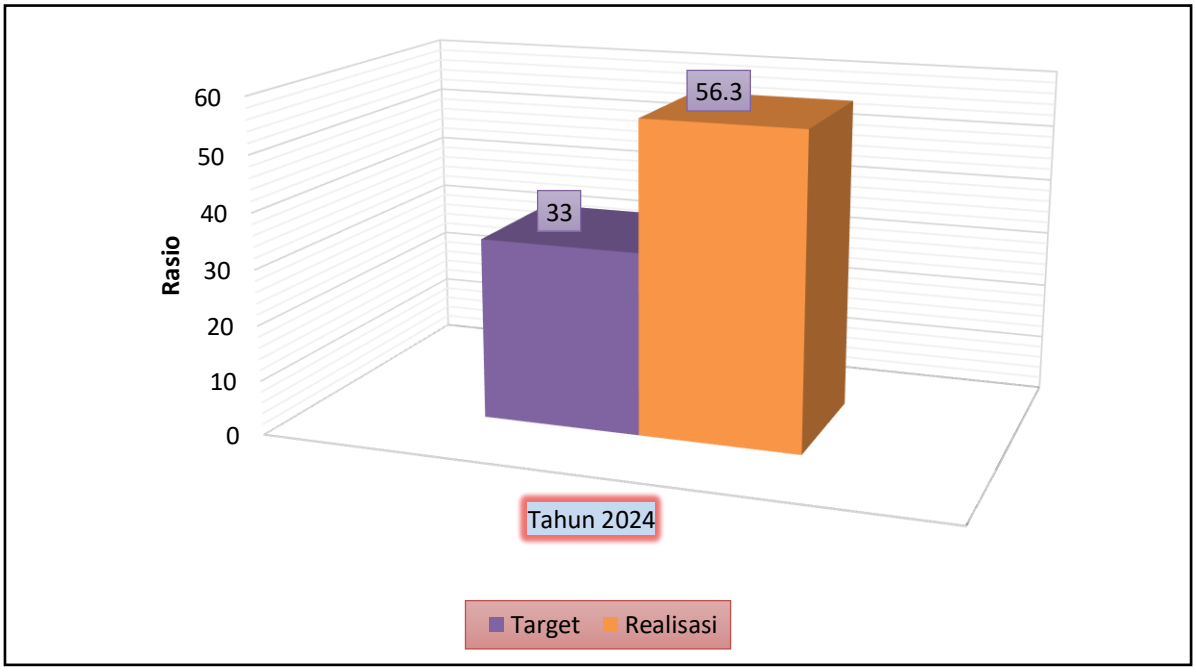

Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2025

Pada tahun 2024, target sasaran yang ditetapkan sebesar **33 Rasio** dengan realisasi sebesar **56,30 Rasio**. Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan dengan perhitungan indikator kinerja akan semakin baik apabila nilai realisasi semakin turun maka besar capaian sasaran ini adalah **58,61 %**.

Dasar perhitungan berdasarkan :

- Jumlah lakalantas sebanyak 52 kejadian,

- Jumlah keberangkatan angkutan umum sebesar 10.828 keberangkatan yang terdiri dari :
  - Terminal Girimaya sebanyak 18.076/15 penumpang = 1.205 keberangkatan 3066/7 penumpang = 438 keberangkatan
  - Terminal Toboali = 1.945 keberangkatan.
  - Bus sekolah = 28 unit x 20 hari x 11 bulan = 6.160 keberangkatan
  - Bus Pegawai = 3 unit x 20 hari x 12 bulan = 720 keberangkatan
  - Angkot = 1 unit x 30 hari x 12 bulan = 360 keberangkatan
- Jadi, Rasio Kejadiaan Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan tahun 2024 = 52 x 10.828/10.000 = 56,30

6. **Sasaran keenam : Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi.** Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Bangka Tengah maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 3.6
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2024

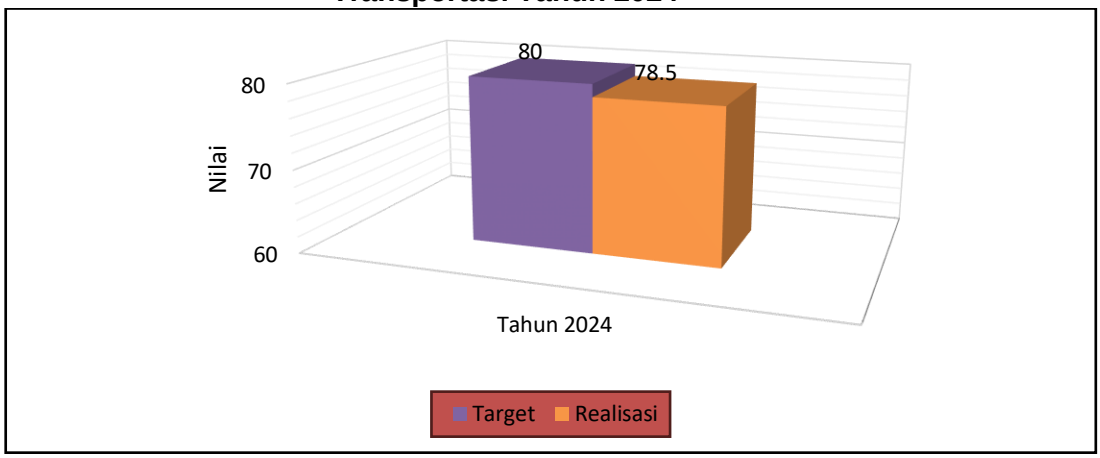

Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2025

Pada tahun 2024 target sasaran yang ditetapkan sebesar 80 (Nilai) dengan realisasi sebesar **78,50** (Nilai) sehingga capaian sasaran ini adalah **98,125**% dapat dinterpretasikan sasaran pada indikator ini belum tercapai.

Penentuan nilai IKM tahun 2024 yaitu dengan melaksanakan kegiatan SKM yang dilaksanakan sebanyak 2 periode yaitu semester I dan semester II. Pelaksanaan SKM semester I dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Juni 2024 dengan jumlah responden penerima layanan yang diperoleh sebanyak 269 responden dan pelaksanaan SKM semester II pada bulan Juli s.d Desember 2024 dengan jumlah responden penerima layanan yang diperoleh sebanyak 196 orang. Dari hasil pelaksanaan SKM semester I dan II didapat nilai sebesar **78,50**.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Bis pegawai sudah tua dan rusak, semoga segera diganti”.
- “Saat upacara dan senam bersama agar bus standby dilokasi dan kembali mengantarkan pegawai sampai kantor masing2. (driver untuk dpt ikut kegiatan dimaksud)”.

- "Perawatan mobil rutin agar penumpang tetap nyaman berkendara dengan bus pemda".
- " Tambahan Bis Pegawai karena kursi penumpang untuk pegawai."
- "Sudah wajib ganti bis sih untuk yg rute sungaiselan, soalnya kalo hujan bocor dan basah semua didalam bis itu
- Kondisi Bus sudah tidak layak untuk di gunakan karna sudah banyak yg bocor saat hujan dan kursi penumpang bagian belakang sudah rusak parah.
- Semoga bus pegawai tetap berjalan terus dan pelayanan smakin unggul.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Fasilitas sarana dan prasarana yang masih banyak kekurangan
- Sarana bus pegawai dan bus sekolah banyak yang sudah rusak
- pelayanan masih dirasakan kurang maksimal karna masih berdesakan di dalam bus

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi Diperkimhub Kabupaten Bangka Tengah untuk terus-menerus melakukan perbaikan serta meningkatkan kinerja pelayanan Bidang Perhubungan di Kabupaten Bangka Tengah, seperti perbaikan kendaraan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pelayanan penerangan jalan dan lain-lain sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

C. Tujuan III : Peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Handal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2024	2024	2024
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	82,00 (Nilai)	76,67	93,50

Tujuan Ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang mempunyai 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator antara lain :

7. **Sasaran ketujuh : Meningkatnya akuntabilitas kinerja** dengan indikator kinerja **Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan,**

   Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah**.**

   Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Diperkimhub Kabupaten Bangka Tengah sebagai salah satu instansi pemerintah ditentukanlah nilai SAKIP sebagai indikator sasaran ini.

   Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Gambar 3.7
Nilai akuntabilitas kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2024

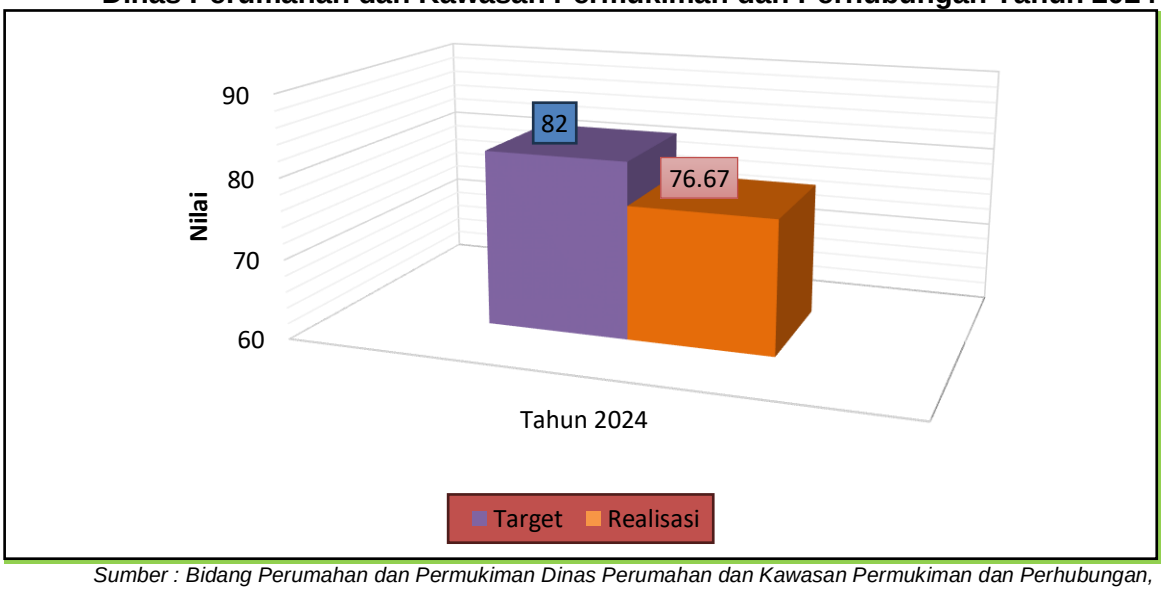

Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2025

Pada tahun 2024, target sasaran ini adalah sebesar 82,00 (Nilai) dengan realisasi sebesar 76,67 (Nilai). Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan, besar capaian sasaran ini adalah 93,50% yang dapat diinterpestasikan bahwa sasaran pada indikator ini masih belum tercapai.

Oleh karena itu Diperkimhub Kabupaten Bangka Tengah berupaya untuk meningkatkan nilai capaian tersebut dengan melakukan perbaikan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga diperoleh capaian nilai SAKIP 100%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada Tabel III.3 :

Tabel III.3
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
A.	Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman								
1.		Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.		Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	28,18 Ha	29,94 Ha	106,24 %	30,18 Ha	33,22 Ha	110,07 %
3.		Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	96,89%	97,50%	100,52 %	97,50%	98,21%	100,73 %
4.		Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	63,41%	65,85%	103,84 %	68.29%	65,85%	96,43%
B..	Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan Yang Berkualitas								
5.		Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	34,00 Rasio	33,49 Rasio	101,52%	33,00 Rasio	56,30 Rasio	58,93%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
6.		Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	78,00 (Nilai)	80,35 (Nilai)	103,01 %	80,00 (Nilai)	78,50 (Nilai)	97,56 %
C.	Peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Handal								
7.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	81,00 (Nilai)	77,05 (Nilai)	95,12 %	82,00 (Nilai)	76,67(Nilai)	93,50%

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2023 dan 2024 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :

Gambar III. 8
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2023 dan Tahun 2024

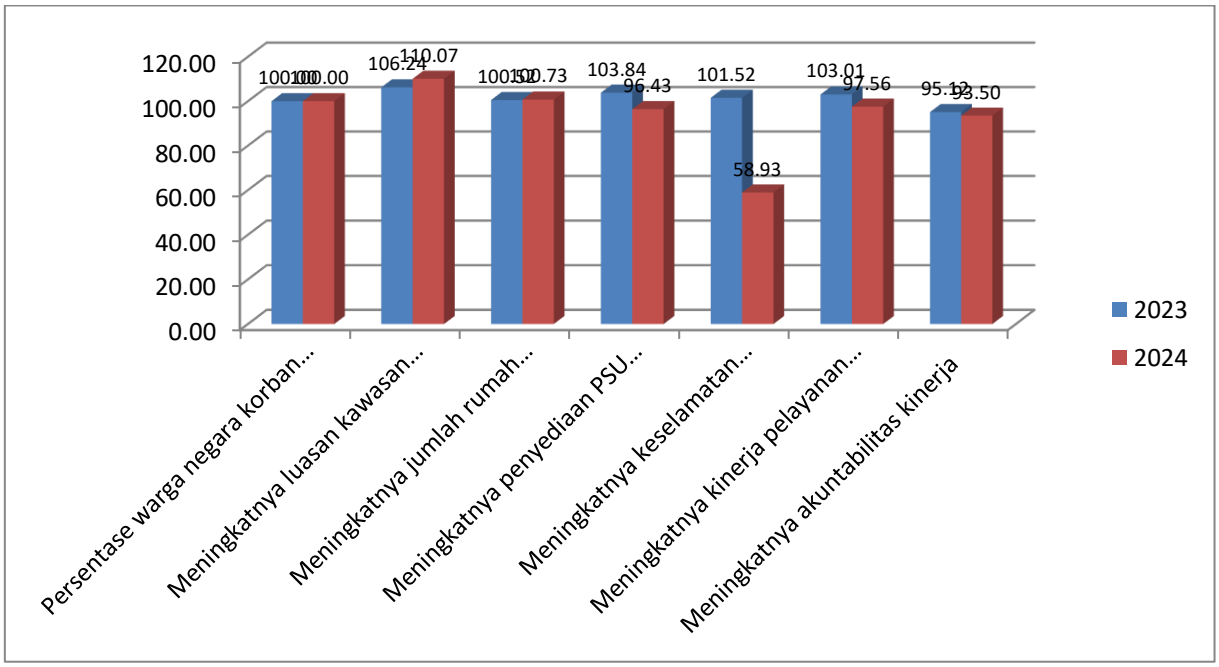

Uraian penjelasan tabel dan gambar:

A. Tujuan I : Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. **Sasaran pertama : Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dengan Indikator Kinerja : Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.**

Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dan capaian 100%. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota mencapai 100% dihitung berdasarkan pelaksanaan **pembebasan lahan** relokasi program

kabupaten pada tahun 2023 yang disiapkan untuk 119 (seratus sembilan belas) unit rumah bagi 119 (seratus sembilan belas) kepala keluarga yang bertempat tinggal di sempadan sungai yang akan direlokasi pada tahun 2024, yaitu :

- Desa Kurau Barat sebanyak 2 (dua) titik lokasi yang terdiri dari 85 (delapan puluh lima) unit rumah ; dan
- Desa Kurau sebanyak 1 (satu) lokasi yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) unit rumah.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dan capaian 100%. Capaian 100% pada Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni pada tahun 2024 dihitung berdasarkan **pembangunan unit rumah layak huni** bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit rumah yang berada di sempadan sungai yang direlokasi, yaitu :

- Desa Kurau Barat sebanyak 2 (dua) titik lokasi yang terdiri dari 85 (delapan puluh lima) unit rumah ; dan
- Desa Kurau sebanyak 1 (satu) lokasi yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) unit rumah.

Pelaksanaaan pembangunan rumah layak huni pada tahun 2024 ini merupakan langkah awal pengentasan permukiman kumuh terpadu Kabupaten Bangka Tengah yang telah mendapatkan dukungan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK Tematik PPKT) Tahun Anggaran 2024 serta dukungan dana APBD Kabupaten Bangka Tengah untuk pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang merupakan kegiatan tindak lanjut dari pelaksanaan capaian kegiatan pada tahun 2023 yaitu pematangan lahan untuk pembangunan 119 unit rumah yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bangka Tengah.

2. **Sasaran kedua : Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani dengan Indikator Kinerja : Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani,** Indikator Kinerja tersebut merupakan **Indikator Kinerja Utama** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah**.**

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 28,18 Ha. Pelaksanaan pada tahun 2023 yaitu penanganan kawasan kumuh di Desa Batu Belubang dan Kelurahan Sungaiselan dengan capaian luas penanganan masing-masing adalah 1,00 Ha dan 1,60 Ha sehingga jumlah luas penanganan kawasan kumuh pada tahun 2023 adalah 2,60 Ha. Luas penanganan kawasan kumuh yang telah ada pada tahun 2022 sebesar 2,6 Ha dijumlahkan dengan akumulasi luas penanganan kawasan kumuh pada tahun 2022 sebesar 27,34 Ha. Dengan demikian, akumulasi luas penanganan kawasan kumuh pada tahun 2023 adalah 29,14 Ha sehingga mendapatkan realisasi sasaran sebesar 29,94 Ha atau dengan capaian sebesar 106,24% dari target atau dapat diinterpesentatifkan sasaran pada indikator ini tercapai.

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 30,18 Ha. Pelaksanaan pada tahun 2024 yaitu penanganan kawasan kumuh di Desa Batu Belubang seluas 0,75 Ha, Desa Kelurahan Sungaiselan seluas 1,98 Ha, dan Desa Kurau seluas 0,55 Ha sehingga jumlah luas penanganan kawasan kumuh pada tahun 2024 adalah 3,28 Ha. Luas penanganan kawasan kumuh yang telah ada pada tahun 2024 sebesar 3,28 Ha dijumlahkan dengan akumulasi luas penanganan kawasan kumuh pada tahun 2023 sebesar 29,4 Ha sehingga mendapatkan realisasi sasaran sebesar 33,22 Ha atau dengan capaian sebesar 110,07 % dari target atau dapat diinterpesentatifkan sasaran pada indikator ini tercapai.

3. **Sasaran ketiga : Meningkatnya jumlah rumah layak huni** dengan Indikator Kinerja **Persentase Rumah Layak Huni.**

Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Pada tahun 2023, target sasaran tersebut adalah sebesar 96,89% dengan realisasi sebesar 97,50%. Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan, besar capaian sasaran ini adalah 100,63%. Perhitungan realisasi capaian 2023 berdasarkan divisi dari akumulasi jumlah rumah layak huni sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 58.044 rumah layak huni dan jumlah kepala keluarga pada tahun 2023 sebesar 59.532 kepala keluarga dikalikan 100 persen.

Pada tahun 2024, target sasaran tersebut adalah sebesar 97,50%. dengan realisasi sebesar 98,21%. Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan, besar capaian sasaran ini adalah 100,73%.

Perhitungan realisasi capaian 2024 berdasarkan divisi dari akumulasi jumlah rumah layak huni sampai dengan tahun 2024 dibagi jumlah kepala keluarga pada tahun 2024 sebesar 59.532 kepala keluarga dikalikan 100 persen yaitu akumulasi rumah layak huni sampai dengan awal 2024 sebanyak 58.044 rumah layak huni ditambah dengan jumlah pembangunan rumah layak huni pada tahun 2024 sebanyak 424 rumah layak huni yang terdiri dari 119 unit rumah layak huni berdasarkan program kegiatan Diperkimhub yang bersumber dari dana DAK dan APBD dan terdapat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang bersumber dari dana APBN melalui Kegiatan Bantuan Stimulai Perumahan Swadaya (BSPS) Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 305 unit yang dilaksanakan di Desa Namang sebanyak 60 unit dan Desa Lubuk Besar sebanyak 245 unit.

4. **Sasaran keempat : Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman** dengan Indikator Kinerja **Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU.** Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah sebesar 63,41% dengan realisasi sebesar 65,85%. Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan, besar capaian sasaran ini adalah 103,85%. Capaian tersebut melampaui 100% dikarenakan pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Perumahan yang mendapat bantuan Pembangunan PSU Perumahan MBR berupa jalan paving blok yang bersumber dari dana APBN melalui kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1) Perumahan Mulia Indah 2, yang berlokasi di Kecamatan Pangkalanbaru
2) Perumahan Damai Lestari 5, yang berlokasi di Kecamatan Pangkalanbaru
3) Perumahan Pesona Mangkol Asri 2, yang berlokasi di Kecamatan Pangkalanbaru

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 68,29% dengan realisasi sebesar 65,85%. Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan, besar capaian sasaran ini adalah 96,43%. Capaian tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan pada tahun 2024 Diperkimhub Bangka Tengah **tidak mendapatkan** bantuan Pembangunan PSU Perumahan MBR berupa jalan paving blok

yang bersumber dari dana APBN melalui kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Tujuan Kedua Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan yang Berkualitas, mempunyai **2 (dua) sasaran dan 2 (dua) sasaran indikator antara lain :**

5. **Sasaran kelima : Meningkatnya keselamatan transportasi** dengan Indikator Kinerja **Rasio Kejadiaan Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan.**

Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Pada tahun 2023, target sasaran yang ditetapkan sebesar **34 Rasio** dengan realisasi sebesar 33,49 **Rasio**. Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan, besar capaian sasaran ini adalah **98,5%**.

Dasar perhitungan berdasarkan :

- Jumlah lakalantas sebanyak 32 kejadian,
- Jumlah keberangkatan angkutan umum sebesar 10.468 keberangkatan yang terdiri dari :
  - Terminal Girimaya sebanyak 24.900/15 penumpang = 1.663 keberangkatan dan 4.977/7 penumpang = 700 keberangkatan
  - Terminal Toboali = 1.945 keberangkatan.
  - Bus sekolah = 28 unit x 20 hari x 11 bulan = 6.160 keberangkatan
    - Jadi, Rasio Kejadiaan Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan tahun 2023 = 32 x 10.468/10.000 = **33,49 rasio**

Pada tahun 2024, target sasaran yang ditetapkan sebesar **33 Rasio** dengan realisasi sebesar **56,30 Rasio**. Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan, besar capaian sasaran ini adalah **58,61 %**.

Dasar perhitungan berdasarkan :

- Jumlah lakalantas sebanyak 52 kejadian,
- Jumlah keberangkatan angkutan umum sebesar 10.828 keberangkatan yang terdiri dari :
  - Terminal Girimaya sebanyak 18.076/15 penumpang = 1.205 keberangkatan 3066/7 penumpang = 438 keberangkatan

- Terminal Toboali = 1.945 keberangkatan.
- Bus sekolah = 28 unit x 20 hari x 11 bulan = 6.160 keberangkatan
- Bus Pegawai = 3 unit x 20 hari x 12 bulan = 720 keberangkatan
- Angkot = 1 unit x 30 hari x 12 bulan = 360 keberangkatan

➢ Jadi, Rasio Kejadiaan Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan tahun 2024 = 52 x 10.828/10.000 = 56,30

6. **Sasaran keenam : Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi.** Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Pada tahun 2023 target sasaran yang ditetapkan sebesar 78,00 (Nilai) dengan realisasi sebesar **79,68** (Nilai) sehingga capaian sasaran ini adalah **102,15**% dapat dinterpretasikan sasaran pada indikator ini tercapai.

Penentuan nilai IKM tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan kegiatan SKM yang dilaksanakan sebanyak 2 periode yaitu semester I dan semester II sehingga diperoleh nilai IKM tahun 2023 yang merupakan nilai rata-rata dari akumulasi nilai IKM semester 1 sebesar **80,02** dan nilai IKM semester II sebesar **79.35**. Pelaksanaan SKM semester I pada bulan Januari s.d. Juni 2023 dengan jumlah responden penerima layanan yang diperoleh sebanyak 140 orang dan pelaksanaan SKM semester II pada bulan Juli s.d Desember 2023 dengan jumlah responden penerima layanan yang diperoleh sebanyak 327 orang.

Pada tahun 2024 target sasaran yang ditetapkan sebesar 80 (Nilai) dengan realisasi sebesar **78,50** (Nilai) sehingga capaian sasaran ini adalah **98,125**% dapat dinterpretasikan sasaran pada indikator ini belum tercapai.

Penentuan nilai IKM tahun 2024 yaitu dengan melaksanakan kegiatan SKM yang dilaksanakan sebanyak 2 periode yaitu semester I dan semester II. Pelaksanaan SKM semester I dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Juni 2024 dengan jumlah responden penerima layanan yang diperoleh sebanyak 269 responden dan pelaksanaan SKM semester II pada bulan Juli s.d Desember 2024 dengan jumlah responden penerima layanan yang diperoleh sebanyak 196 orang. Dari hasil pelaksanaan SKM semester I dan II didapat nilai sebesar **78,50**.

C. Tujuan Ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang mempunyai 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator antara lain :

7. **Sasaran ketujuh : Meningkatnya akuntabilitas kinerja** dengan indikator kinerja **Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama** Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah**.**

Pada tahun 2023, target sasaran ini adalah sebesar 81,00 (Nilai) dengan realisasi sebesar 77,05 (Nilai). Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan, besar capaian sasaran ini adalah 95,12% yang dapat diinterpestasikan bahwa sasaran pada indikator ini masih belum tercapai.

Pada tahun 2024, target sasaran ini adalah sebesar 82,00 (Nilai) dengan realisasi sebesar 76,67 (Nilai). Artinya, berdasarkan besar realisasi terhadap target yang telah ditentukan, besar capaian sasaran ini adalah 93,50% yang dapat diinterpestasikan bahwa sasaran pada indikator ini masih belum tercapai.

Selanjutnya, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021—2026 diuraikan pada **table III.4** Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan pada **Tabel III.5**.

Tabel III.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Tahun 2024 dengan Target Akhir 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4/5*100*
A.	Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Presentase Kepemilikan Rumah Layak Huni (Jumlah RLH/KK kali 100%)	87,25	89,17%	97,85
1.		Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	100,00%	100,00%
2.		Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	33,22 Ha	37,22 Ha	89,25%
3.		Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	98,21%	98,37%	99,84%
4.		Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	65,85%	73,17%	89,99%
B.	Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan Yang Berkualitas		Jumlah Arus Penumpang Angkutan	1.803.649	4.000.000	45,09
5		Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	56,30	32,00	56,83%
6.		Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	78,50 (Nilai)	80,00 (Nilai)	98,125%
C..	Peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan		Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	Baik	Baik	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4/5*100*
	Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Handal					
7.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	76,67(Nilai)	82,00 (Nilai)	93,50%

Uraian penjelasan tabel :

A. **Tujuan Renstra yang pertama** yaitu Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Presentase Kepemilikan Rumah Layak Huni (Jumlah RLH/KK kali 100%) mempunyai target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 89,17% dan hasil capaian pada tahun 2024 adalah realisasi kinerja sebesar 87,25 sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 97,85% .

1. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat dengan indikator kinerja Persentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 100% dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 100% sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 100 %.
2. Sasaran Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani dengan indikator kinerja Nilai Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 33,22 Ha dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 37,22 Ha sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 89,25 %.
3. Sasaran Meningkatnya jumlah rumah layak huni dengan indikator kinerja Persentase rumah layak huni pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 98,37% dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 98,37% sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 99,84%.
4. Sasaran Meningkatnya Penyediaan Psu Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU pada

tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 65,85% dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 73,17% sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 89,99%.

B. Tujuan Renstra yang kedua yaitu Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan Yang Berkualitas dengan indikator kinerja Jumlah Arus Penumpang Angkutan mempunyai target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 4.000.000 dan hasil capaian pada tahun 2024 adalah realisasi kinerja sebesar 1.803.649 sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 45,09%.

5. Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi dengan indikator kinerja Indeks Rasio Kejadiaan Kecelakaan Transportasi Per 10 Ribu Keberangkatan pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 56,30 (Rasio) dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 32,00 (Rasio sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 56,83%. Untuk indikator ini semakin kecil semakin baik pula kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
6. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 78,50 (Nilai) dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 80,00 (Nilai) sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 98,125%

C. Tujuan Renstra yang ketiga yaitu Peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Handal dengan indikator kinerja KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN mempunyai target akhir Renstra tahun 2026 sebesar Baik dan hasil capaian pada tahun 2024 adalah realisasi kinerja sebesar Baik sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 100%.

7. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 76,67 (Nilai) dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 82,00 (Nilai) sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 93,50%

Tabel III.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL	Sumber data	%CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6=4/5*100*
1.	Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	100,00%	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni	100,00%
2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	33,22 Ha	Tanggung jawab penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha berada di tingkat kabupaten/kota.	http://epkp.ciptakarya.pu.go.id/berita/p/percepatan-penanganan-permukiman-kumuh-prioritas	100%
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	98,21%	57,58	PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3.TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020–2024 https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2024/02/2024pmpupr3.pdf	171,45%
4.	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	65,85%	100,00	PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3.TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN	65,85%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL	Sumber data	%CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6=4/5*100*
					PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020–2024 https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2024/02/2024pmpupr3.pdf	
5.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	56,30	23,71	http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian/iku/2024/003/003	42,11%
6.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	78,50 (Nilai)	88,5	https://www.dephub.go.id/post/read/hasil-survey-nasional-indikator--72--masyarakat-puas-dengan-kinerja-kementerian-perhubungan	88,70%
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	76,67(Nilai)	64,23,	https://infopublik.id/	119,36%

Uraian penjelasan tabel :

1. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat dengan indikator kinerja Persentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan standar nasional sebesar 100 % sehingga tingkat kemajuan dengan standar nasional adalah 100 %. (Sumber data standar nasional 2024 didapat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni).
2. Sasaran Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani dengan indikator kinerja Nilai Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 33,22 Ha dibandingkan dengan standar nasional yang menyatakan bahwa tanggung jawab penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha berada di tingkat kabupaten/kota sehingga tingkat kemajuan capaian dengan standar nasional dapat dikatakan sebesar 100 %. (Sumber data standar nasional 2024 didapat dari laman *http://epkp.ciptakarya.pu.go.id/berita/p/percepatan-penanganan-permukiman-kumuh-prioritas*)

3. Sasaran Meningkatnya jumlah rumah layak huni dengan indikator kinerja Persentase rumah layak huni pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 98,37% dibandingkan dengan standar nasional sebesar 57,58 % sehingga tingkat kemajuan capaian dengan standar nasional adalah 171,45%. (Sumber data standar nasional didapat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3.Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024 dan Laman *Https://Jdih.Pu.Go.Id/Internal/Assets/Assets/Produk/Permenpupr/2024/02/2024pmpupr3.Pdf)*
4. Sasaran Meningkatnya Penyediaan Psu Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 65,85% dibandingkan dengan standar nasional sebesar 100 % sehingga tingkat kemajuan capaian dengan standar nasional adalah 65,85%. (Sumber data standar nasional 2024 didapat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3.Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024 dan Laman : *Https://Jdih.Pu.Go.Id/Internal/Assets/Assets/Produk/Permenpupr/2024/02/2024pmpupr3.Pdf*)
5. Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi dengan indikator kinerja Indeks Rasio Kejadiaan Kecelakaan Transportasi Per 10 Ribu Keberangkatan pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 56,30 (Rasio) dibandingkan dengan standar nasional sebesar 23,71 sehingga tingkat kemajuan capaian dengan standar nasional adalah 42,11%. Untuk indikator ini semakin kecil semakin baik pula kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. (Sumber data standar nasional 2024 didapat dari Laman : *http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian/iku/2024/003/003*).
6. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 78,50 (Nilai) dibandingkan dengan standar nasional sebesar 88,5 sehingga tingkat kemajuan capaian 2024 dengan standar nasional 2024

adalah 88,70%. (Sumber data standar nasional 2024 didapat dari Laman *https://www.dephub.go.id/post/read/hasil-survey-nasional-indikator--72--masyarakat-puas-dengan-kinerja-kementerian-perhubungan*)

7. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 76,67 (Nilai) dibandingkan dengan standar nasional sebesar 64,23,sehingga tingkat kemajuan capaian 2024 dengan standar nasional 2024 adalah 119,36%. (Sumber data standar nasional 2024 didapat dari Laman *https://www.dephub.go.id/post/read/hasil-survey-nasional-indikator--72--masyarakat-puas-dengan-kinerja-kementerian-perhubungan*)

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1.	Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	100,00%	100,00%	**Analisis Keberhasilan** : - **K**omitmen pimpinan daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pegawai Diperkimhub serta bantuan Pemerintah Pusat berupa dukungan dana DAK Tematik PPKT 2024 untuk pembangunan rumah layak huni sebanyak 119 unit untuk relokasi masyarakat Kurau yang berada di bantaran sungai Kurau. **Analisis Kegagalan / Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja** yaitu : • Minimnya fasilitas kantor yang mendukung mobilitas kegiatan • kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya terkait penempatan lokasi lahan dsb;	**Solusi :** - Mempertahankan Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian 100% Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni terpenuhi seluruhnya - Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan kegiatan - Menyusun program/kegiatan yang mendukung pencapaian IKU - Melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, tepat guna dan sasaran.
2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	30,18 Ha	33,22 Ha	110,07%	**Analisis Keberhasilan :** Adanya Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian 100% kegiatan penanganan di kawasan kumuh Desa Kurau pada tahun 2024 **Analisis Kegagalan / Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja yaitu** : • Minimnya fasilitas kantor yang mendukung mobilitas kegiatan • kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya terkait penempatan lokasi lahan dsb;	**Solusi :** - Mempertahankan Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani terpenuhi seluruhnya - Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan kegiatan - Menyusun program/kegiatan yang mendukung pencapaian IKU - Melaksanakan kegiatan secara efektif

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
							dan efisien, tepat guna dan sasaran.
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	97,50%	98,21%	100,73%	**Analisis Keberhasilan :** Adanya Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian 100% Terpenuhinya jumlah usulan pada pembangunan yang bersumber dari dana APBN serta adanya kegiatan pembangunan RLH yang bersumber dana APBD. **Analisis Kegagalan / Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja yaitu** Pada tahun 2024, dukungan anggaran pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.0,- (nol rupiah) dimana program tersebut mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Diperkimhub yaitu Presentase Rumah Layak Huni Tidak dilaksanakan kegiatan pembangunan atau perbaikan rumah layak huni dikarenakan Pemda Bangka Tengah mengalami defisit anggaran sehingga lebih dahalu memprioritaskan kegiatan yang lebih penting	**Solusi :** Walaupun dukungan anggaran pada tahun 2024 secara khusus pada kegiatan pembangunan rumah layak huni /perbaikan rumah tidak huni akan tetapi DIPERKIMHUB Kabupaten Bangka Tengah tetap optimal dalam mengakomodir dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan pembangunan rumah layak huni pada : 1) Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota di Desa Kurau dan Desa Kurau Barat untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni sebanyak 119 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp.17.063.643.605,- Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) sebesar Rp. 12.994.371.605,00 dan dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 4.069.272.000,00 juga Dana CSR dari Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 387.200.000,- dan PT TIMAH sebesar Rp. 387.200.000. Penanganan pembangunan rumah melalui pola penanganan relokasi yang juga berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi layak dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan juga pencegahan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari Dinas Kesehatan dimana Desa Kurau

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
							dan Desa Kurau Barat masih belum *Open Defecation Free* (ODF) dan keseluruhan penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga termasuk rawan bencana banjir ROB karena pengaruh pasang surut air laut. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung DIPERKIMHUB sudah berupaya mendukung pencegahan stunting melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dengan penanganan relokasi walaupun data penerima bantuan tidak termasuk didalam data stunting yang dikeluarkan oleh dinas terkait. 2) Penanganan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selain melalui anggaran pemerintah daerah (APBD) juga bersumber dari anggaran APBN melalui program BSPS. Pada tahun 2024 Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan bantuan BSPS sebanyak 305 unit yang berlokasi di Desa Namang sebanyak 60 unit dan 245 unit di Desa Lubuk Besar. Data penerima bantuan untuk program BSPS berdasarkan data Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) bersumber dari BKKBN. 3) DIPERKIMHUB Kabupaten Bangka Tengah akan memanfaatkan dan menggunakan data Keluarga Beresiko Stunting (KRS) dalam pelaksanaan intervensi dalam percepatan penurunan stunting dan akan lebih baik jika data tersebut dapat juga disinergikan dengan data Kemiskinan Ekstrem, penanganan BABS dan akses sanitasi dan air minum layak mengingat kondisi penganggaran di Kabupaten Bangka Tengah.

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
4.	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	68.29%	65,85%	96,43%	**Analisis Kegagalan** : - Tidak adanya kegiatan pembangunan PSU Perumahan yang bersumber dana APBN yang mendukung pencapaian target IKU ini sedangkan pada program PSU yang dilaksanakan dengan anggaran APBD pada tahun 2024 ini tidak mendukung peningkatan jumlah PSU perumahan sehingga target IKU untuk indikator ini tidak tercapai. Program dan kegiatan PSU tahun 2024 hanya mengakomodir kegiatan POKIR seperti pembangunan jalan setapak dan pagar kuburan yang outnya tidak mendukung pencapaian target nilai IKU ini. **Analisis Keberhasilanm :** Adanya Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian 100% dengan dukungan anggaran APBD selain kegiatan pembangunan PSU yang bersumber dana APBN	**Solusi :** Dikarenkan dukungan APBD yang minim dikarenakan kondisi Bangka tengah mengalami efisiensi anggaran maka Diperkimhub terus berkoordinasi ke pusat melalui aplikasi Sibaru
5.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	33,00 Rasio	56,30	58,93%	**Analisis Keberhasilan** : - Perlunya Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian 100%target 2024 pada Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan dengan komitmen peningkatan kelengkapan fasilitas jalan di ruas jalan Koba-Pangkalpinang **Analisis kegagalan** : Pada tahun 2024, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bangka Tengah meningkat akibat human error, seperti kurangnya disiplin dan pemahaman aturan berkendara, serta kebiasaan berbahaya seperti penggunaan ponsel dan ngebut. Selain itu, minimnya rambu, penerangan	**Solusi :** - Terus berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Polres dan jajarannya. - Diperkimhub Bateng terus mengupayakan pengadaan sarana dan prasana untuk meningkatkan keamanan berlalu lintas baik dengan mengupayakan menggunakan anggaran APBN ataupun APBN - Diperkimhub tetap melakukan sosialiasi keamanan berkendara dan berlalu lintas dan diharapkan dukungan dana untuk

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
						jalan, serta kondisi jalan yang buruk turut memperburuk situasi. Faktor lain seperti kendaraan tidak layak jalan dan cuaca buruk juga meningkatkan risiko kecelakaan. Untuk menekan angka ini, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan penegakan hukum yang lebih ketat.	kegiatan sosialiasi kepada masyarakat tetap didukung oleh pemerintah Daerah. - Diperkimhub Bateng terus mengupayakan pengadaan Terminal C di Kab. Bangka Tengah sehingga data yang tidak tergantung pihak lain dan tentunya terminal C sangat menunjang kenyamanan masyarakat Kab, Bangka Tengah dalam bertransportasi
6.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	80,00 (Nilai)	78,50 (Nilai)	97,56 %	**Analisis Keberhasilan**: Perlunya Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk pencapaian 100 % dengan : - Dukungan anggaran pemerintah Daerah untuk memperbaharui fasilitas sarana dan prasarana transportasi publik yang baik sesuai dengan SOP - Pelayanan publik sesuai dengan SOP - Pengaruh mutu layanan terhadap kepuasan masyarakat yaitu kinerja yang baik dari pegawai Diperkimhub Kab. Bangka Tengah akan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat. - Pengaruh prosedur Pelayanan yang sesuai standar SOP **Analisis kegagalan** : Fasilitas sarana dan prasarana yang masih banyak kekurangan - Sarana bus pegawai dan bus sekolah banyak yang sudah rusak - Kenyamanan pengguna Bus masih dirasakan kurang maksimal karena masih berdesakan di dalam bus serta fasilitas yang sudah tidak memadai	**Solusi :** - Perbaikan saran dan prasana seperti perbaikan kendaraan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pelayanan penerangan jalan dan lain-lain sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. dukungan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. - Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai.

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	82,00 (Nilai)	76,67	93,50	**Analisis kegagalan** : - kurangnya pemahaman tentang pedoman SAKIP (Masih minimnya pengetahuan Perencana dalam kriteria penilaian Lakip, pengetahuan metode penilaian Lakip yang benar (dasar-dasar pembuatan laporan, cascading atau peta proses bisnis serta crosscutting yang benar serta solusi peningkatan nilai Lakip) - kurangnya komitmen Pemerintah Daerah yang ditandai dengan anggaran pendukung SAKIP (Perencanaan) di Diperkimhub yang kecil sehingga membuat penerapan SAKIP Kabupaten Bangka Tengah khususnya Diperkimhub kurang optimal. : - belum tersinerginya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan SAKIP, - belum adanya regulasi yang mengatur dan memaparkan secara jelas tentang kriteria penilaian atau indikator kinerja, - masih kurangnya koordinasi serta komitmen untuk menyatukan pandangan dan arah tujuan, - pemahaman mengenai substansi SAKIP secara menyeluruh masih rendah, serta - pemanfaatan LAKIP yang masih sebatas untuk pemenuhan kewajiban pelaporan. **Analisis Keberhasilan**: - Keberhasilan didapat dari Komitmen pimpinan daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga staf, serta bantuan Pemerintah Pusat. - kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selaku *Counterpart* memiliki peran masing-masing dalam membangun SAKIP di unit kerjanya yang terintegrasi dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam suatu organisasi/OPD.	**Solusi :** - Dengan melakukan perbaikan penerapan SAKIP, yakni dengan mengupayakan perencanaan secara matang dan terkoordinir serta terus berkoordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan penilaian LAKIP dan meningkatkan pengetahuan secara mandiri. - Peningkatan kompetensi pegawai yang berurusan langsung dengan penyusunan laporan kinerja sehingga perlu dilaksanakan rutin setiap tahun sehingga dapat menjadi pedoman dalam pembuatan laporan SAKIP. - Pengelolaan SDM untuk upaya ke arah integrasi sistem juga menjadi bahasan yang hendak diwujudkan. - Tetap melakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian dan penerapan SAKIP di OPD.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran PERTAMA :** Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat **dengan Indikator kinerja** Persentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni **pada tahun 2024** mempunyai **target sebesar** 100,00% **dengan realisasi nilai** 100,00% **dan persentase capaian** 100,00%**.**

   - **Analisis Keberhasilan :**
     - Keberhasilan didapat dari Komitmen pimpinan daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga staf, serta bantuan Pemerintah Pusat berupa dana DAK Tematik PPKT 2024 untuk pembangunan rumah layak huni sebanyak 119 unit untuk relokasi masyarakat Kurau yang berada di bantaran sungai Kurau.

   - **Analisis Kegagalan / Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja yaitu** :
     Sedangkan kendala yang dihadapi Diperkimhub Kabupaten Bangka Tengah adalah :
     - Minimnya fasilitas kantor yang mendukung mobilitas kegiatan
     - Kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya terkait penempatan lokasi lahan dsb;

   - **Solusi yang perlu dilakukan yaitu :**
     - Mempertahankan Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian 100% Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni terpenuhi seluruhnya
     - Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan kegiatan
     - Menyusun program/kegiatan yang mendukung pencapaian IKU
     - Melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, tepat guna dan sasaran.

2. **Sasaran keDUA :** Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani **dengan Indikator kinerja** Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani **pada tahun 2024** mempunyai target **sebesar** 30,18 Ha **dengan realisasi nilai** 33,22 Ha **dan persentase capaian** 110,07 %

- **Analisis Keberhasilan :**
  - Adanya Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian 100% kegiatan penanganan di kawasan kumuh Desa Kurau pada tahun 2024

- **Analisis Kegagalan / Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja yaitu** :
  - Minimnya fasilitas kantor yang mendukung mobilitas kegiatan
  - kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya terkait penempatan lokasi lahan dsb;

- **Untuk itu, Solusi yang perlu dilakukan yaitu :**
  - Mempertahankan Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani terpenuhi seluruhnya
  - Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan kegiatan
  - Menyusun program/kegiatan yang mendukung pencapaian IKU
  - Melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, tepat guna dan sasaran.

3. **Sasaran keTIGA :** Meningkatnya jumlah rumah layak huni **dengan Indikator kinerja** Persentase rumah layak huni **pada tahun 2024** mempunyai target **sebesar** 97,50% **dengan realisasi nilai** 98,21% **dan persentase capaian** 100,73 %

- **Analisis Keberhasilan :**
  - Adanya Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian 100% Terpenuhinya jumlah usulan pada pembangunan yang bersumber dari dana APBN (DAK Tematik PPKT) serta adanya kegiatan pembangunan RLH yang bersumber dana APBD.

- **Analisis Kegagalan / Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja yaitu** :
  - Pada tahun 2024, dukungan anggaran pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.0,- (nol rupiah) dimana program tersebut mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Diperkimhub yang ke 3 yaitu Presentase Rumah Layak Huni.

(Tidak dilaksanakan kegiatan pembangunan atau perbaikan rumah layak huni dikarenakan Pemda Bangka Tengah mengalami defisit anggaran. Kriteria pencapaian target tahun 2024 ini didapat dari program lain yang outnya sama menghasilkan Rumah Layak Huni yaitu program relokasi perumahan akibat program pemerintah kabupaten/kota yang outpunya menghsilkan rumah layak huni bagi masyarakat yang direlokasi. Program ini pada renstra mendukung IKU Diperkimhub yang pertama).

- **Untuk itu, Solusi yang perlu dilakukan yaitu :**

Walaupun dukungan anggaran pada tahun 2024 secara khusus pada kegiatan pembangunan rumah layak huni /perbaikan rumah tidak huni akan tetapi DIPERKIMHUB Kabupaten Bangka Tengah tetap optimal dalam mengakomodir dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan pembangunan rumah layak huni pada :

- Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota di Desa Kurau dan Desa Kurau Barat untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni sebanyak 119 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp.17.063.643.605,- Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) sebesar Rp. 12.994.371.605,00 dan dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 4.069.272.000,00 juga Dana CSR dari Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 387.200.000,- dan PT TIMAH sebesar Rp. 387.200.000. Penanganan pembangunan rumah melalui pola penanganan relokasi yang juga berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi layak dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan juga pencegahan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari Dinas Kesehatan dimana Desa Kurau dan Desa Kurau Barat masih belum *Open Defecation Free* (ODF) dan keseluruhan penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga termasuk rawan bencana banjir ROB karena pengaruh pasang surut air laut. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung DIPERKIMHUB sudah berupaya mendukung pencegahan stunting melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dengan penanganan relokasi walaupun data penerima bantuan tidak termasuk didalam data stunting yang dikeluarkan oleh dinas terkait.
- Penanganan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selain melalui anggaran pemerintah daerah (APBD) juga bersumber dari anggaran APBN melalui program BSPS. Pada tahun 2024 Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan bantuan BSPS

sebanyak 305 unit yang berlokasi di Desa Namang sebanyak 60 unit dan 245 unit di Desa Lubuk Besar. Data penerima bantuan untuk program BSPS berdasarkan data Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) bersumber dari BKKBN.

- DIPERKIMHUB Kabupaten Bangka Tengah akan memanfaatkan dan menggunakan data Keluarga Beresiko Stunting (KRS) dalam pelaksanaan intervensi dalam percepatan penurunan stunting dan akan lebih baik jika data tersebut dapat juga disinergikan dengan data Kemiskinan Ekstrem, penanganan BABS dan akses sanitasi dan air minum layak mengingat kondisi penganggaran di Kabupaten Bangka Tengah.

4. **Sasaran keEMPATt :** Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman **dengan Indikator kinerja** Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU **pada tahun 2024** mempunyai target **sebesar** 68.29% **dengan realisasi nilai** 65,85% **dan persentase capaian** 96,43%

- **Analisis Kegagalan / Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja yaitu** :

  - Tidak adanya kegiatan pembangunan PSU Perumahan yang bersumber dana APBN yang mendukung pencapaian target IKU ini sedangkan pada program PSU yang dilaksanakan dengan anggaran APBD pada tahun 2024 ini tidak mendukung peningkatan jumlah PSU perumahan sehingga target IKU untuk indikator ini tidak tercapai. Program dan kegiatan PSU tahun 2024 hanya mengakomodir kegiatan POKIR seperti pembangunan jalan setapak dan pagar kuburan yang outnya tidak mendukung pencapaian target nilai IKU ini.

- **Analisis Keberhasilan :**

  - Adanya Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian target IKU 100% dengan dukungan anggaran APBD selain kegiatan pembangunan PSU yang bersumber dana APBN

- **Untuk itu, Solusi yang perlu dilakukan yaitu :**

  - Dikarenakan dukungan APBD Kabupaten Bangka Tengah yang minim akibat kondisi saat ini sedang mengalami deficit anggaran sehingga Pemerintah daerah harus

melakukan efisiensi anggaran maka Diperkimhub terus berkoordinasi ke pusat melalui aplikasi Sibaru.

5. **Sasaran keLIMA :** Meningkatnya keselamatan transportasi **dengan Indikator kinerja** Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan **pada tahun 2024** mempunyai target **sebesar** 33,00 Rasio **dengan realisasi nilai** 58,93% **dan persentase capaian** 58,93%. Untuk kriteria penilaian indikator kinerja ini adalah nilai semakin baik apabila realisasi semakin menurun.

- **Analisis Kegagalan / Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja yaitu** :
  - Pada tahun 2024, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bangka Tengah meningkat akibat human error, seperti kurangnya disiplin dan pemahaman aturan berkendara, serta kebiasaan berbahaya seperti penggunaan ponsel dan ngebut. Selain itu, minimnya rambu, penerangan jalan, serta kondisi jalan yang buruk turut memperburuk situasi. Faktor lain seperti kendaraan tidak layak jalan dan cuaca buruk juga meningkatkan risiko kecelakaan. Untuk menekan angka ini, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan penegakan hukum yang lebih ketat.

- **Analisis Keberhasilan :**
  - Perlunya Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk mendukung pencapaian 100% target 2024 pada Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan dengan komitmen peningkatan kelengkapan fasilitas jalan di ruas jalan Kabupaten Bangka Tengah
  - Untuk menekan angka kecelakaan yang semakin tinggi diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Hal ini membutuhkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang keamanan berkendara dalam berlalu lintas serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasana jalan sehingga dapat meminimalisir angka kecelakaan di kabupaten Bangka Tengah.

- **Untuk itu, Solusi yang perlu dilakukan yaitu :**
  - Terus berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Polres dan jajarannya.

- Diperkimhub Bateng terus mengupayakan pengadaan sarana dan prasana untuk meningkatkan keamanan berlalu lintas baik dengan mengupayakan menggunakan anggaran APBN ataupun APBN
- Diperkimhub tetap melakukan sosialiasi keamanan berkendara dan berlalu lintas dan diharapkan dukungan dana untuk kegiatan sosialiasi kepada masyarakat tetap didukung oleh pemerintah Daerah.
- Diperkimhub Bateng terus mengupayakan pengadaan Terminal C di Kab. Bangka Tengah sehingga data yang tidak tergantung pihak lain dan tentunya terminal C sangat menunjang kenyamanan masyarakat Kab, Bangka Tengah dalam bertransportasi

6. **Sasaran keENAM :** Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan **dengan Indikator kinerja** Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi **pada tahun 2024** mempunyai target **sebesar** 80,00 (Nilai) **dengan realisasi nilai** 78,50 (Nilai)**dan persentase capaian** 97,56 %.

- **Analisis Kegagalan / Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja yaitu** :
  - Fasilitas sarana dan prasarana Diperkimhub yang masih banyak kekurangan
  - Sarana bus pegawai dan bus sekolah banyak yang sudah rusak
  - Kenyamanan pengguna Bus masih dirasakan kurang maksimal karena masih berdesakan di dalam bus serta fasilitas yang sudah tidak memadai
- **Analisis Keberhasilan :**

  Perlunya Komitmen Kepala Daerah dan Kepala PD untuk pencapaian 100 % dengan :

  - Dukungan anggaran pemerintah Daerah untuk memperbaharui fasilitas sarana dan prasarana transportasi publik yang baik sesuai dengan SOP
  - Pelayanan publik sesuai dengan SOP
  - Pengaruh mutu layanan terhadap kepuasan masyarakat yaitu kinerja yang baik dari pegawai Diperkimhub Kab. Bangka Tengah akan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat.
  - Pengaruh prosedur Pelayanan yang sesuai standar SOP

- **Untuk itu, Solusi yang perlu dilakukan yaitu :**
  - Perbaikan sarana dan prasana seperti perbaikan kendaraan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pelayanan penerangan jalan dan lain-lain sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai dengan dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
  - Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai untuk mencapai Pelayanan publik sesuai dengan SOP.

7. **Sasaran keTUJUH :** Meningkatnya akuntabilitas kinerja **dengan Indikator kinerja** Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan **pada tahun 2024** mempunyai target **sebesar** 82,00 (Nilai) **dengan realisasi nilai** 76,67 (Nilai) **dan persentase capaian** 93,50%.

- **Analisis Kegagalan / Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja yaitu** :
  - kurangnya pemahaman tentang pedoman SAKIP (Masih minimnya pengetahuan Perencana dalam kriteria penilaian Lakip, pengetahuan metode penilaian Lakip yang benar (dasar-dasar pembuatan laporan, cascading atau peta proses bisnis serta crosscutting yang benar serta solusi peningkatan nilai Lakip)
  - kurangnya komitmen Pemerintah Daerah yang ditandai dengan anggaran pendukung SAKIP (Perencanaan) di Diperkimhub yang kecil sehingga membuat penerapan SAKIP Kabupaten Bangka Tengah khususnya Diperkimhub kurang optimal. :
  - belum tersinerginya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan SAKIP,
  - belum adanya regulasi yang mengatur dan memaparkan secara jelas tentang kriteria penilaian atau indikator kinerja,
  - masih kurangnya koordinasi serta komitmen untuk menyatukan pandangan dan arah tujuan,
  - pemahaman mengenai substansi SAKIP secara menyeluruh masih rendah, serta
  - pemanfaatan LAKIP yang masih sebatas untuk pemenuhan kewajiban pelaporan.

- **Analisis Keberhasilan :**
  - Keberhasilan didapat dari Komitmen pimpinan daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga staf, serta bantuan Pemerintah Pusat.
  - Peran serta dan kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selaku *Counterpart* memiliki peran masing-masing dalam membangun SAKIP di unit kerjanya yang terintegrasi dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam suatu organisasi/OPD.

- **Untuk itu, Solusi yang perlu dilakukan yaitu :**
  - Dengan melakukan perbaikan penerapan SAKIP, yakni dengan mengupayakan perencanaan secara matang dan terkoordinir serta terus berkoordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan penilaian LAKIP dan meningkatkan pengetahuan secara mandiri.
  - Peningkatan kompetensi pegawai yang berurusan langsung dengan penyusunan laporan kinerja sehingga perlu dilaksanakan rutin setiap tahun sehingga dapat menjadi pedoman dalam pembuatan laporan SAKIP.
  - Pengelolaan SDM untuk upaya ke arah integrasi sistem juga menjadi bahasan yang hendak diwujudkan.
  - Tetap melakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian dan penerapan SAKIP di OPD.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
I	**Tujuan I :** Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman **Sasaran I :** Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Jumlah angka backlog perumahan**	**89,80%**	**Menunjang**
II.	**Tujuan I :** Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman **Sasaran III :** Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	100,73%		**Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah**	**100,00%**	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah kecamatan yang teridentifikasi berada dalam kawasan rawan bencana alam dan relokasi program pemerintah kabupaten kota**	**100,00%**	**Menunjang**
				Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Lokasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan yang teridentifikasi	100,00%	Menunjang
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	100,00%	Menunjang
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota		
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah paket kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	100,00%	Menunjang
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah bulan terlaksananya perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan**	**100,00%**	**Menunjang**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	Menunjang
III	**Tujuan I :** Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman **Sasaran II :** Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	110,07%	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (di bawah 10 Ha)**	**131%**	**Menunjang**
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah bulan terlaksananya perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**100,00%**	**Menunjang**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata dan tertangani**	**100,00%**	**Menunjang**
				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100,00%	Menunjang
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100,00%	Menunjang
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat**	**100,00%**	**Menunjang**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	100,00%	Menunjang
IV	**Tujuan I :** Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman **Sasaran IV :** Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	96,43%	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum**	**102,90%**	**Menunjang**
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan**	**100,00%**	**Menunjang**
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	100,00%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan		
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	100,00%	Menunjang
V.	**Tujuan II :** Tersedianya infrastruktur Bidang Perhubungan yang berkualitas		**58,61**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kinerja lalu lintas kabupaten**	**285,29 %**	**Menunjang**
VI.	**Sasaran V :** Meningkatnya keselamatan transportasi **Sasaran VI :** Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	**97,56%**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase penetapan tarif lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang diterbitkan**	**88,89%**	**Menunjang**
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Kinerja lalu lintas kabupaten**	285,29 %	**Menunjang**
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah unit perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan**	**100,00%**	**Menunjang**
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	100,00%	Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	95,39%	Menunjang
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan**	**100,00%**	**Menunjang**
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala**	**93,8%**	**Menunjang**
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100,00%	Menunjang
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	93,8%	Menunjang
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	100,00%	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan			
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**100,00%**	**Menunjang**
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	**Jumlah kegiatan dalam merumuskan persetujuan hasil Andalalin untuk jalan kabupaten**	**100,00%**	**Menunjang**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Kabupaten/Kota			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100,00%	Menunjang
				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi	100,00%	Menunjang
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan**	**100,00%**	**Menunjang**
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Persentase penetapan tarif lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang diterbitkan**	**88,89%**	**Menunjang**
				Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten**	**100,00%**	**Menunjang**
				Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan dalam daerah kabupaten/kota	100,00%	Menunjang
VII	**Tujuan III : Peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan**	**93,50%**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT**	**Nilai SAKIP OPD**	**97,56%**	**Menunjang**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
	Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Handal **Sasaran VI :** **Meningkatnya akuntabilitas kinerja**	**Perhubungan**		**A**			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00%**	**Menunjang**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00%**	**Menunjang**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100,00%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100,00%**	**Menunjang**
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00%**	**Menunjang**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100,00%	Menunjang
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00%**	**Menunjang**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00%**	**Menunjang**
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00%**	**Menunjang**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00%**	**Menunjang**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	104,76%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100,00%	Menunjang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa **semu**a program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 **Menunjang** kinerja Diperkimhub.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 terdapat 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dengan 3 (tiga) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yaitu :

1. **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** mendukung **Tujuan I** yaitu : Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 2 (dua) sasaran yaitu **Sasaran I** : Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan **Sasaran III** : Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dilaksanakan dengan anggaran sebesar **Rp. 17.106.165.105** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.16.310.586.777,00** sehingga persentase capaian anggaran sebesar **95,35%.**
2. **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** mendukung **Tujuan I** yaitu : Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 1 (satu) sasaran yaitu **Sasaran II** : Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani dilaksanakan dengan anggaran sebesar **Rp. 2.387.000.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.355.897.638,00** sehingga persentase capaian anggaran sebesar **98,70%.**
3. **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** mendukung **Tujuan I** yaitu : Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 1 (satu) sasaran yaitu **Sasaran IV** : Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan anggaran sebesar **Rp.842.435.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 812.354.599,00** sehingga persentase capaian anggaran sebesar **96.43%.**
4. **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** mendukung **Tujuan II :** Tersedianya infrastruktur Bidang Perhubungan yang berkualitas dengan 2 (sasaran) yanitu : **Sasaran V :** Meningkatnya keselamatan transportasi dan **Sasaran VI :** Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan Meningkatnya dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.**2.348.540.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2.271.674.779**sehingga persentase capaian anggaran sebesar **96.72%.**
5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** mendukung **Tujuan II :** Tersedianya infrastruktur Bidang Perhubungan yang berkualitas dengan 2 (sasaran) yanitu : **Sasaran V:** Meningkatnya keselamatan transportasi dan **Sasaran VI :** Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan Meningkatnya dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.**2.348.540.000,00** dengan realisasi

anggaran sebesar Rp.**2.271.674.779,00** sehingga persentase capaian anggaran sebesar **96.72%**.

6. **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** mendukung **Tujuan II :** Tersedianya infrastruktur Bidang Perhubungan yang berkualitas dengan 2 (sasaran) yanitu : **Sasaran V:** Meningkatnya keselamatan transportasi dan **Sasaran VI :** Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan Meningkatnya dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. **10.000.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2.500.000,00** sehingga persentase capaian anggaran sebesar **25%**. (Pada anggaran ini tidak dapat terserap 100% dikarenakan sempat adanya pemangkasan anggaran oleh TAPD dan dikembalikan pada TW IV dengan jadwal kegiatan yang telah melewati waktu pelaksanaan).
7. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** mendukung **Tujuan III :** Peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Handal **Sasaran VI :** Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. **10.252.671.360,00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.**9.218.567.130,00** sehingga persentase capaian anggaran sebesar **89.91%**.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang menjabarkan antara pagu dengan realisasi keuangan dan kinerja yang digunakan pada tahun 2024 diuraikan pada tabel. berikut :

Tabel III.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%CAPAIAN
1.	**Tujuan I :** Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman **Sasaran I :** Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**17.106.165.105**	**16.310.586.777**	**95.35%**
	Tujuan I : Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman **Sasaran III :** Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni				
1.			**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**9.971.500**	**3.901.500**	**39.13%**
1.1			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3.171.500	2.871.500	90.54%
1.2			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1.800.000	600.000	33.33%
1.3			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	**5.000.000**	**430.000**	**8.60%**
2.			**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**17.063.643.605**	**16.281.867.807**	**95.42%**
2.1			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	17.063.643.605	16.281.867.807	95.42%
3.			**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**45.000.000**	**36.374.134**	**80,83%**
3.1			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	45.000.000,00	36.374.134,00	80,83%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%CAPAIAN
II.	**Tujuan I :** Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman **Sasaran II :** Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.387.000.000**	**2.355.897.638**	**98,70%**
1			**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**39.000.000**	**33.731.136**	**86,49%**
1.1			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	-	-	-
1.2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	32.550.000	24.817.470	76.24%
2			**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**63.993.500**	**65.926.478**	**103.02%**
2.1			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	60.896.000	62.828.978	103.17%
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	3.097.500	3.097.500	100.00%
3			**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**25.000.000**	**21.305.000**	**85.22%**
3.1			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	25.000.000	21.305.000	85.22%
III.	**Tujuan I :** Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman **Sasaran IV :**	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**842.435.000**	**812.354.599**	**96.43%**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%CAPAIAN
	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman					
1			**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**842.435.000**	**812.354.599**	**96.43%**
1.1			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	811.810.000	794.849.642	97.91%
1.2			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	18.211.500	14.771.557	81.11%
1.3			Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	12.413.500	2.733.400	22.02%
IV.	**Tujuan III : Peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Handal** **Sasaran VI :** **Meningkatnya akuntabilitas kinerja**	**Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.252.671.360**	**9.218.567.130**	**89.91%**
1.			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.000.000**	**19.024.700**	**95.12%**
1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.229.700	94.86%
1.2			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,	4.795.000	95.90%
2			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.776.771.360**	**3.154.432.005**	**83.52%**
2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.770.121.360	3.148.410.405	83.51%
2.2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	1.595.000	96.67%
2.3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	5.000.000	-	88.53%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%CAPAIAN
			SKPD			
3			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.000.000**	**8.180.000**	**81.80%**
3.1			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	3.280.000	65.60%
3.2			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.900.000	98.00%
4			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.400.000**	**3.028.050**	**19.66%**
4.1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
4.2			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.400.000	3.028.050	19.66%
5			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**288.500.000**	**265.215.371**	**91.93%**
5.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	3.947.100	98.68%
5.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,	39.332.500	98.33%
5.3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	13.937.500	46.46%
5.4			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.500.000	58.104.6000	94.48%
5.5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,	2.400.000	80.00%
5.6			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	147.493.671	98.33%
6			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**
6.1			Pengadaan Mebel	-	-	-
6.2			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
7			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**492.000.000**	**435.811.371**	**88.58%**
7.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000.000	118.360.248	78.91%
7.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	86.148.208	86.15%
7.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	242.000.000	231.303.016	95.58%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%CAPAIAN
			Kantor			
8			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.650.000.000**	**5.332.875.532**	**94.39%**
8.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.000.000	67.727.072	91.52%
8.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.556.000.000	5.246.208.460	94.42%
8.3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	18.940.000	94.70%
8.4			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
	Tujuan II : Tersedianya infrastruktur Bidang Perhubungan yang berkualitas **Sasaran V :** Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**2.348.540.000**	**2.271.674.779**	**96.72%**
	Sasaran VI : Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**10.000.000**	**2.500.000**	**25%**
V	**Tujuan II :** Tersedianya infrastruktur Bidang Perhubungan yang berkualitas **Sasaran V :** Meningkatnya keselamatan transportasi **Sasaran VI :** Meningkatnya kinerja	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**2.348.540.000**	**2.271.674.779**	**96.72%**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%CAPAIAN
1			**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**1.846.920.000**	**1.812.201.093**	**98.12%**
1.1			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	659.500.000	658.604.290	99.86%
1.2			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.187.420.000	1.153.596.803	97.15%
2			**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**-**	**-**	**-**
2.1			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	-
3			**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**76.000.000**	**65.145.264**	**85.72%**
3.1			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	76.000.000	65.145.264	85.72%
4			**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**285.980.000**	**274.360.069**	**95.92%**
4.1			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-
4.2			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	41.356.321	82.71%
4.3			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	89.000.000	87.894.516	98.76%
4.4			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	22.500.000	22.331.167	99.25%
4.5			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	99.651.065	99.65%
4.6			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24.480.000	23.073.000	94.25%
5.			**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan**	**40.000.000**	**33.620.000**	**84.05%**
5.1			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	40.000.000	33.620.000	84.05%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%CAPAIAN
6.			**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**61.040.000**	**49.702.353**	**84.05%**
6.1			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	30.000.000	20.834.861	69.45%
6.2			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	31.040.000	28.867.492	93.00%
7			**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**38.600.000**	**36.600.000**	**94.82%**
7.1			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	38.600.000	36.600.000	94.82%
VI	**Tujuan II :** Tersedianya infrastruktur Bidang Perhubungan yang berkualitas **Sasaran V :** Meningkatnya keselamatan transportasi **Sasaran VI :** Meningkatnya kinerja	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**10.000.000**	**2.500.000**	**25%**
1			**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	**2.500.000**	**25.00%**
1.1			Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	2.500.000	25.00%

III.3 TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada **Tabel III.9** berikut :

Tabel III.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
A.	**Tujuan I : Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**87,49 %**	**87,25%**	**99,73%**	**18.068.453.605**	**17.229.372.154**	**95,36%**	**4.64%**
	Sasaran :							
1.	Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	100,00%	100,00%	100,00%	17.106.165.105	16.310.586.777	95.35%	4.65%
2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	30,18 Ha	33,22 Ha	106,24%	119.853.500	106.430.778	98,70	1,13%
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	97,50%	98,21%	100,73%	0	0	0	100%
4.	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	68,29%	65,85%	96,43%	842.435.000	812.354.599	96.43%	3,57%
B.	**Tujuan II : Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan Yang Berkualitas**	**3.000.000** org/tahun	**1.803.649** org/tahun	**60,12%**	**2.358.540.000**	**2.274.174.779**	**96,42%**	**3,58%**
	Sasaran :							
5.	Meningkatnya keselamatan transportasi	33 rasio	56,30 rasio	58,61%	2.358.540.000	2.274.174.779	96,42%	3,58%
6.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan	80,00 (Nilai)	78,05 (Nilai)	97,56%				

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
C.	**Tujuan III : Peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Handal**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**10.227.271.360**	**9.218.567.130**	**90,14**	**9,86%**
	Sasaran :							
7.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	82,00 (Nilai)	76,67 (Nilai)	93,50%	10.252.671.360	9.218.567.130	89.91%	10,09%

Uraian penjelasan tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Tujuan I : Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan target indikator kinerja 87,49 dan hasil realisasi 87,25 sehingga persentase capaian sebesar 99,73% .

Hal ini dicapai dengan menggunakan dana anggaran sebesar Rp. 18.068.453.605 dan dana yang terpakai sebesar Rp. 17.229.372.154 sehingga persentase capaian anggaran sebesar **95,36%** dengan tingkat efisiensi sebesar **4.64%.**

Tujuan Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai 4 (empat) sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yaitu :

1. Sasaran I : Terpenuhinya pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat dengan target indikator kinerja : 100,00% dan realisasi tahun 2024 sebesar 100% sehingga persentase capaian tahun 2024 sebesar 100,00% .

   Untuk mencapai realisasi capaian, sasaran ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.106.165.105,00 sedangkan dana yang terpakai/terserap sebesar Rp. 17.229.372.154,00 atau sebanding dengan persentase capaian sebesar 95,36% sehingga mendapat tingkat efisiensi sebesar 4.64%

2. Sasaran II : Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani dengan target indikator kinerja 30,18 Ha dan hasil realisasi tahun 2024 sebesar 33,22 Ha, sehingga persentase capaian tahun 2024 sebesar 106,24%.

   Untuk mencapai realisasi capaian, sasaran ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 119.853.500,00 sedangkan dana yang terpakai/terserap sebesar Rp. 106.430.778,00 atau sebanding dengan persentase capaian sebesar 98,70 % sehingga mendapat tingkat efisiensi sebesar 1,13%%.

3. Sasaran III : Meningkatnya jumlah rumah layak huni dengan target indikator kinerja 97,50% dan mencapai realisasi sebesar 98,21% pada tahun 2024 sehingga persentase capaian tahun 2024 sebesar 100,73%.

   Walaupun dukungan anggaran pada tahun 2024 secara khusus pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (kegiatan pembangunan/perbaikan rumah layak huni) tidak ada atau sama dengan Rp.0 (nol rupiah) akan tetapi DIPERKIMHUB Kabupaten Bangka Tengah tetap optimal dalam mengakomodir dan mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan pembangunan rumah layak huni dengan bersumber pada : Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota di Desa Kurau dan Desa Kurau Barat untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni sebanyak 119 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp.17.063.643.605,00. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) sebesar Rp. 12.994.371.605,00 dan dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 4.069.272.000,00 juga Dana CSR dari Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 387.200.000,00 dan PT TIMAH sebesar Rp. 387.200.000,00 sehingga mendapat tingkat efisiensi pada program penunjang IKU ini sebesar 100 %.

4. Sasaran IV : Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman dengan target indikator kinerja 68,29 dan realisasi tahun 2024 sama dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 65,85% sehingga persentase capaian tahun 2024 yaitu sebesar 96,43%, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 tidak dilaksanakan pelaksanaan kegiatan penyerahan PSU perumahan yang mendukung penilaian sasaran ini..

   Kegiatan pelaksanaan PSU pada tahun 2024 tetap dilaksanakan akan tetapi tidak ada kegiatan yang mendukung PSU perumahan dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp. 842.435.000,00 dengan dana yang terpakai/terserap sebesar Rp. 812.354.599,00 dan persentase capaian sebesar 96.43% sehingga mendapat tingkat efisiensi sebesar 3,57%.

B. Tujuan II : Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan Yang Berkualitas dengan target indikator kinerja 3.000.000 orang/tahun mendapat hasil realisasi pada tahun 2024 sebesar 1.803.649 org/tahun dengan persentase capaian sebesar 60,12 %.

Hal ini dicapai dengan menggunakan pagu anggaran sebesar Rp.2.358.540.000,00 dengan dana yang terpakai/terserap sebesar Rp.2.274.174.779,00 atau senilai persentase capaian sebesar 96,42%% dengan tingkat efisiensi sebesar 3,58%.

Tujuan Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan Yang Berkualitas mempunyai 2 (dua) sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yaitu :

5. Sasaran V : Meningkatnya keselamatan transportasi dengan target indikator kinerja: 33 rasio dan realisasi tahun 2024 sebesar 56,30 rasio sehingga persentase capaian tahun 2024 sebesar 58,61% .

   Untuk mencapai realisasi capaian, sasaran ini didukung dengan 2 (dua) Program dengan pagu anggaran total sebesar Rp. 2.358.540.000,00 sedangkan dana yang terpakai/terserap sebesar Rp. 2.274.174.779,00 atau sebanding dengan persentase capaian sebesar 96,42% sehingga mendapat tingkat efisiensi sebesar 3,58%.
6. Sasaran VII : Meningkatnya kinerja pelayanan Perhubungan dengan target indikator kinerja 80,00 (Nilai dan hasil realisasi tahun 2024 sebesar 78,05 (Nilai), sehingga persentase capaian tahun 2024 sebesar 97,56%%.

   Untuk mencapai realisasi capaian, sasaran ini didukung dengan 2 (dua) Program dengan pagu anggaran total sebesar Rp. 2.358.540.000,00 sedangkan dana yang terpakai/terserap sebesar Rp. 2.274.174.779,00 atau sebanding dengan persentase capaian sebesar 96,42% sehingga mendapat tingkat efisiensi sebesar 3,58%.

C. Tujuan III : Peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Handal dengan target indikator kinerja Baik mendapat hasil realisasi pada tahun 2024 sebesar Baik dengan persentase capaian sebesar 60,12 %.

Hal ini dicapai dengan menggunakan pagu anggaran sebesar Rp.2.358.540.000,00 dengan dana yang terpakai/terserap sebesar Rp.2.274.174.779,00 atau senilai persentase capaian sebesar 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 0%.

Tujuan Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan Yang Berkualitas mempunyai 2 (dua) sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yaitu :

7. Sasaran VII : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dengan target indikator kinerja : 82,00 (Nilai)dan realisasi tahun 2024 sebesar 76,67 (Nilai) sehingga persentase capaian tahun 2024 sebesar 93,50%.

   Untuk mencapai realisasi capaian, sasaran ini didukung dengan 2 (dua) Program dengan pagu anggaran total sebesar Rp. 10.252.671.360,00 sedangkan dana yang terpakai/terserap sebesar Rp. 9.218.567.13,00 atau sebanding dengan persentase capaian sebesar 89.91%sehingga mendapat tingkat efisiensi sebesar 10,09%%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
		Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Jumlah angka backlog perumahan**	**500 unit**	**449 unit**	**65,80%**	**17.106.165.105**	**16.310.586.777**	**95,35**	61,08
		Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	**100 %**	**100 %**	**100,00%**				
1.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Kecamatan yang teridentifikasi berada dalam kawasan rawan bencana alam dan relokasi program pemerintah kabupaten kota	**6 Kecamatan**	**6 Kecamatan**	**100,00%**	**9.971.500**	**3.901.500**	**39,13**	60,87
1.1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Lokasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan yang teridentifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	3.171.500	2.871.500	90,54	9,46
1.2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1.800.000	600.000	33,33	66,67
1.3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5.000.000	430.000	8,60	91,40
2.	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah paket kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**1 Paket**	**1 Paket**	**100,00%**	**6.095.000.000**	**2.348.415.042**	**95,42**	4,58
2.1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	119 unit rumah	119 unit rumah	100,00%	17.063.643.605	16.281.867.807	95,42	4,58
3.	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah Bulan Terlaksananya Perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00%**	**32.550.000**	**24.817.470**	**76,24**	23,76

3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	32.550.000	24.817.470	76,24	23,76
II	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (dibawah 10 Ha**	**58,65**	**76,83**		**119.853.500**	**106.430.778**	**87,05**	**12,95**
1	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Jumlah Bulan Terlaksananya Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00%**	**30.860.000**	**19.199.300**	**62,21**	**37,79**
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	30.860.000	19.199.300	62,21	37,79
2	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertata dan tertangani**	**2 Ha**	**2 Ha**	**100,00%**	**63.993.500**	**65.926.478**	**99,75**	0,25
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	60.896.000	62.828.978	99,74	0,26
2.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	3.097.500	3.097.500	100,00	0
3	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat**	**2 Kawasan**	**2 Kawasan**	**100,00%**	**25.000.000**	**21.305.000**	**85,22**	**14,78**
3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	20 Laporan	1 Laporan	100,00%	25.000.000	21.305.000	85,22	14,78
III	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani**	**4,69**	**39,85**	**131,21%**	**-**	**-**	**-**	**-**
IV	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum**	**62,36**	**64,17**	**105,56%**	**842.435.000**	**812.354.599**	**96,43**	**3,57**
1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan PSU Perumahan	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**100,00%**	**842.435.000**	**812.354.599**	**96,43**	**3,57**
1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	Jumlah PSU perumahan yang disediakan untuk menunjang fungsi hunian	8 Paket	8 Paket	100,00%	811.810.000	794.849.642	97,91	2,09

	Hunian		Lokasi	Lokasi					
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	18.211.500	14.771.557	81,11	18,89
1.3	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	12.413.500	2.733.400	22,02	**77,98**
V	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	82,00	76,67	**95,12 %**	**10.252.671.360**	**9.218.567.130**	**89,91**	**10,09**
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00%**	**20.000.000**	**19.024.700**	**95,12**	**4,88**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	15.000.000	14.229.700	94,86	5,14
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	5.000.000	4.795.000	95,90	4,1
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00%**	**3.776.771.360**	**3.154.432.005**	**83,52**	**16,48**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	90,00%	3.770.121.360	3.148.410.405	83,51	16,49
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1.650.000	1.595.000	96,67	3,33
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	5.000.000	4.426.600,-	88,53	11,47
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00%**	**10.000.000**	**8.180.000**	**81,80**	**18,20**
3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	5.000.000	3.280.000	65,60	34,40
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	5.000.000	4.900.000	98,00	2,00
4	**Administrasi**	**Jumlah bulan pelaksanaan**	**12**	**12**	**100,00%**	**15.400.000**	**3.028.050**	**19,66**	**80,34**

	Kepegawaian Perangkat Daerah	**kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bulan**	**Bulan**					
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	26 Stel	26 Stel	100,00%	15.400.000	3.028.050	19,66	80,34
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00%**	**288.500.000**	**265.215.371**	**91,93**	**8,07**
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%	4.000.000	3.947.100	98,68	1,32
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	100,00%	40.000.000	39.332.500	98,33	1,67
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00%	30.000.000	13.937.500	46,46	53,54
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	6 Paket	100,00%	61.500.000	58.104.6000	94,48	5,52
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 Eksemplar	24 Eksemplar	100,00%	3.000.000	2.400.000	80,00	20,00
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	150.000.000	147.493.671	98,33	1,67
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00%**	**492.000.000**	**435.811.472**	**88,58**	11,42
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	150.000.000	118.360.248	78,91	21,09
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	100.000.000	86.148.208,	86,15	13,85
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	242.000.000	231.303.016	95,58	4,42
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00%**	**5.650.000.000**	**5.332.875.532**	**94,38**	**5,62**
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00%**	74.000.000	67.727.072	91,52	8,48
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00%**	5.556.000.000	5.246.208.460	94,42	5,58

	Dinas Operasional atau Lapangan	perizinannya							
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00%**	20.000.000	18.940.000	94,70	5,3
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kinerja lalu lintas kabupaten**	**0,21 Nilai**	**0,24 Nilai**	**104,00%**	**2.348.540.000**	**2.271.674.779**	**96,72**	**3,28**
1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan** **Panjang meter perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan** **Panjang meter² perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan** **Jumlah lokasi perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan**	**260 Unit**	**260 Unit**	**100,00%**	**1.846.920.000**	**1.812.201.093**	**98,12**	**1,88**
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	260 Unit	260 Unit	100,00%	659.500.000	658.604.290	99,86	0,14
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	1782 Unit	1700 Unit	95%	1.187.420.000	1.153.596.803	97,15	2,85
3	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100,00%**	**76.000.000**	**65.145.264**	**85,72**	**14,83**
3.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	76.000.000	65.145.264	85,72	**14,83**
4	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala**	**1000 Kali Uji**	**1015 Kali Uji**	**101,5%**	**285.980.000**	**274.306.069**	**95,92**	**4,08**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	2 orang	2 orang	50.000.000	41.356.321	82,71	**17,29**
4.1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	89.000.000	74.989.820	98,76	1,24
4.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1200 set	300 set	25%	22.500.000	22.331.167	99,25	0,75
4.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang	10 Unit	10 Unit	100,00%	100.000.000	99.651.065	99,65	0,35

	Bermotor	terpelihara							
4.4	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	24.480.000	23.073.000	94,25	5,75
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	**Jumlah Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100,00%**	**40.000.000**	**33.620.000**	**84,05**	**15,95**
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	40.000.000	33.620.000	84,05	**15,95**
5	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan dalam merumuskan persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Kabupaten**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**100,00%**	**61.040.000**	**49.702.353**	**81,43**	**18,57**
5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	30.000.000	20.834.861	69,45	30,55
5.2	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi Andalalin yang terawasi	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	31.040.000	28.867.492	93,00	7,00
6	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100,00%**	**38.600.000**	**36.600.000**	**94,82**	**5,18**
6.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	38.600.000	36.600.000	94,82	5,18
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase penetapan tarif lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang ditetapkan**	**75,00**	**66,67**	**106,67%**	**10.000.000**	**2.500.000**	**25,00**	**75,00**
1	**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100,00%**	**10.000.000**	**2.500.000**	**25,00**	**75,00**
1.1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	10.000.000	2.500.000	25,00	**75,00**

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Perumahan mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Jumlah angka backlog perumahan dengan target 500 unit tercapai hasil realisasi 449 unit dengan persentase capaian 65,80% dan Indikator Kinerja Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah dengan target 100 % tercapai hasil realisasi 100 % dengan persentase capaian 100,00%.**

   Program ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 17.106.165.105,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.310.586.777,00 atau senilai persentase capaian 95,35 %.

   Program Pengembangan Perumahan mempunyai 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

   1.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota mempunyai Indikator Kinerja dengan target 6 Kecamatan tercapai hasil realisasi 6 Kecamatan dengan persentase capaian 100 %.

   Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 9.971.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.901.500,00 atau senilai persentase capaian 39,13 %.

   1.2 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota mempunyai Indikator Kinerja dengan target 1 Paket tercapai hasil realisasi dalam 1 Paket dengan persentase capaian 100 %.

   Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 6.095.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.348.415.042,00 atau senilai persentase capaian 95,42 %.

   1.3 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan mempunyai Indikator Kinerja dengan target 12 Bulan tercapai hasil realisasi 12 Bulan dengan persentase capaian 100 %.

   Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 32.550.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.817.470,00 atau senilai persentase capaian 76,24 %.

2. **Program Kawasan Permukiman mempunyai Indikator Kinerja Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh dibawah 10 Ha dengan target 58,65 tercapai hasil realisasi 76,83 dengan persentase capaian 100 %.**

Program ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 119.853.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 106.430.778,00 atau senilai persentase capaian 87,05 %.

Program Kawasan Permukiman mempunyai 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1.1 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai Indikator Kinerja dengan target 12 Bulan tercapai hasil realisasi dalam 12 Bulan dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 30.860.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.199.300,00 atau senilai persentase capaian 62,21 %.

1.2 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha mempunyai Indikator Kinerja dengan target 2 Ha tercapai hasil realisasi dalam 2 Ha dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 63.993.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 65.926.478,00 atau senilai persentase capaian 99,75 %.

1.3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha mempunyai Indikator Kinerja dengan target 2 Kawasan tercapai hasil realisasi dalam 2 Kawasan dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.305.000,00 atau senilai persentase capaian 85,22 %.

3. **Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai Indikator Kinerja Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani dengan target 34,69 tercapai hasil realisasi 39,85 dengan persentase capaian 131,2 %.**

Capaian Indikator Kinerja pada program ini tercapai dengan menggunakan Program Pengembangan Perumahan yang outnya Rumah Layak Huni.

Dikarenakan efisiensi anggaran pada tahun 2024 Program ini tidak dianggarkan. Oleh dari itu tidak ada penetapan pagu anggaran dan realisasi anggaran.

4. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Mempunyai Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Yang Tertangani Dengan Target 62,36 Tercapai Hasil Realisasi 64,17 Dengan Persentase Capaian 105,56 %.**

Program ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 842.435.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 812.354.599 atau senilai persentase capaian 96,43%.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan mempunyai Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan penyelenggaraan PSU Perumahan dengan target 2 Kegiatan tercapai hasil realisasi dalam 2 Kegiatan dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 842.435.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 812.354.599 atau senilai persentase capaian 96,43%.

5. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Mempunyai Indikator Kinerja Nilai Sakip Opd Dengan Target 82,00 Tercapai Hasil Realisasi 76,67 Dengan Persentase Capaian 95,12 %.**

Program ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 10.252.671.360 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.218.567.130 atau senilai persentase capaian 89,91%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai Indikator Kinerja Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 12 bulan tercapai hasil realisasi dalam 12 bulan dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 atau senilai persentase capaian 95,12%.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai Indikator Kinerja Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 12 bulan tercapai hasil realisasi dalam 12 bulan dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 3.776.771.360 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.154.432.005 atau senilai persentase capaian 83,52%.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target 12 bulan tercapai hasil realisasi dalam 12 bulan dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.810.000 atau senilai persentase capaian 81,80%.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target 12 bulan tercapai hasil realisasi dalam 12 bulan dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 15.400.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.028.050 atau senilai persentase capaian 19,96%.

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target 12 bulan tercapai hasil realisasi dalam 12 bulan dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 288.500.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 265.215.371 atau senilai persentase capaian 91,93 %.

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target 12 bulan tercapai hasil realisasi dalam 12 bulan dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 492.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 435.811.472 atau senilai persentase capaian 88,58%.

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Dengan Target 12 bulan tercapai hasil realisasi dalam 12 bulan dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 5.650.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.332.875.532 atau senilai persentase capaian 94,38%.

6. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Mempunyai Indikator Kinerja Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Dengan Target 0,21 Nilai Tercapai Hasil Realisasi 0,21 Nilai Dengan Persentase Capaian 104,00%.

Program ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 2.348.540.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.271.674.779 atau senilai persentase capaian 96,72%.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) mempunyai 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

1.1 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah unit perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan, Panjang meter perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan, Panjang meter² perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan, Jumlah lokasi perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan dengan target 260 Unit tercapai hasil realisasi 260 Unit dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 1.846.920.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.812.201.093 atau senilai persentase capaian 98,12%.

1.2 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam perizinan

penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan dengan target 1 Kegiatan tercapai hasil realisasi dalam 1 Kegiatan dengan persentase capaian 100 %.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 76.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 65.145.264 atau senilai persentase capaian 85,72%.

1.3 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala dengan target 1000 Kali Uji tercapai hasil realisasi dalam 1015 Kali Uji dengan persentase capaian 101,5%.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 285.980.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 274.306.069 atau senilai persentase capaian 95,92%.

1.4 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dengan target 1 Kegiatan tercapai hasil realisasi dalam 1 Kegiatan dengan persentase capaian 100%.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.620.000 atau senilai persentase capaian 84,05%.

1.5 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah kegiatan dalam merumuskan persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Kabupaten dengan target 2 Kegiatan tercapai hasil realisasi dalam 2 Kegiatan dengan persentase capaian 100%.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 61.040.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.702.353 atau senilai persentase capaian 81,43%.

1.6 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan dengan target 1 Kegiatan tercapai hasil realisasi dalam 1 Kegiatan dengan persentase capaian 100%.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 38.600.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 36.600.000 atau senilai persentase capaian 94,82%.

7. Program Pengelolaan Pelayaran Mempunyai Indikator Kinerja Persentase Penetapan Tarif Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan Dengan Target 75,00 Tercapai Hasil Realisasi 66,67 Nilai Dengan Persentase Capaian 106,67%.

Program ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.500.000 atau senilai persentase capaian 25,00%.

Program Pengelolaan Pelayaran mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1.1 Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Mempunyai Indikator Kinerja Jumlah kegiatan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten dengan target 1 Kegiatan tercapai hasil realisasi dalam 1 Kegiatan dengan persentase capaian 100%.

Kegiatan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.500.000 atau senilai persentase capaian 25,00%.

BAB IV
PENUTUP

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 (Perubahan) dan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan bahwa hasil pengukuran kinerja kegiatan secara umum berhasil dengan **baik**.

Meskipun secara umum kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan, namun masih dijumpai adanya **kendala/hambatan dan masalah-masalah** baik internal maupun eksternal, antara lain:

a. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan kurang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
b. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
c. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang luas membutuhkan perlengkapan jalan yang memadai, seperti penerangan jalan umum, rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Namun, alokasi anggaran yang disediakan kurang memadai;
d. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan angkutan umum sebagai dampak meningkatnya angka kepemilikan sepeda motor dan kendaraan pribadi;
f. Masih rendahnya disiplin dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, sehingga terjadi kerusakan jalan karena pelanggaran jalan dan faktor *human error* merupakan penyebab tertinggi terjadinya kecelakaan lalu lintas;
g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara sarana dan prasarana lalulintas yang sudah tersedia;
h. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dewasa ini belum dapat disikapi dengan baik oleh masyarakat;

Sebagai **upaya untuk meningkatkan kinerja** di masa yang akan datang, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah akan dan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan optimal dan mengusulkan penambahan/ penggantian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
b. Mengusulkan penambahan SDM dan peningkatan kapasitas personil yang ada;
c. Perlu dilaksanakan evaluasi/ kajian kebutuhan angkutan umum, fasilitas perlengkapan jalan dan LPJU. Mengajukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan LPJU secara bertahap pada jalan/ wilayah yang menjadi kewenangan kabupaten;
d. Mengupayakan tersedianya sarana transportasi umum di wilayah perkotaan baik melalui APBD Kabupaten, Propinsi, APBN maupun Program CSR:
e. Mengoptimalkan fasilitas angkutan jalan dan melaksanakan monitoring angkutan umum agar meningkatkan layanan dan memperhatikan kelaikan kendaraan;
f. Bekerjasama dengan OPD terkait dan POLRI melakukan pengawasan, pengendalian maupun penegakan hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan LLAJ;
g. Melaksanakan sosialisasi kepada masaarakat akan pentingnya sarana dan prasana lalulintas sebagai penunjang keselamatan berlalulintas;

Agar dapat **mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai**, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dalam bentuk :

a. Diperlukan dukungan dari pihak legistlatif agar program dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah.
b. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sangat diperlukan kerena koordinasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat waktu dan kualitas yang baik pula.
c. Koordinasi teknis dengan masyarakat setempat dalam hal pemeliharaan dengan menjaga agar aset-aset pemerintah kota yang ada pada wilayahnya dapat tetap memberikan pelayanan sesuai dengan fungsinya secara lebih baik.
d. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan urutan prioritas penanganan pekerjaan.
e. Perlu adanya peningkatan dalam sistem pengumpulan data dan tata cara penilaian sehingga outcome dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dapat terlihat dan

tergambarkan dalam setiap laporan hasil kegiatan atau program dapat akhirnya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban kinerja dinas.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja. Harapan kami ada masukan untuk perbaikan dalam penyusunan LKIP mendatang.

Koba, Februari 2025

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

FANI HENDRA SAPUTRA, S.SiT.,M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 198401312006041005

LAMPIRAN

INOVASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024

A. INOVASI

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah	Inovasi Integrasi Antar-moda Transportasi	inovasi kebijakan integrasi antar-moda transportasi yang ada di kabupaten, ada tidaknya peraturan daerah yang diterbitkan untuk mendukung integrasi, fasilitas perpindahan moda, dukungan anggaran, dampak integrasi, dan lainnya

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Waktu, Tempat Penerimaan Penghargaan	Tingkat	Keterangan
1.	Hub Award Kabupaten Terbaik 2024	Jum'at/ 06 Sept 2024, JiExpo Kemayoran Jl. Benyamin Suaeb, Pademangan, Jakarta Utara	Nasional	Hub Award Kabupaten Terbaik 2024 merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada kabupaten-kabupaten terbaik. Penghargaan ini diberikan dalam acara pameran transportasi dan travel fair Hub Space 2024. Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 masuk sebagai Nominator Nominasi **Inovasi Integrasi Antar-moda Transportasi** Kategori Kabupaten Sedang

C. DOKUMENTASI

SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN
Jalan Titian Puspa 4 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon / Fax (0718) 4222991, Email : diperkimhub@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/ 05 /DIPERKIMHUB/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa agar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 188.47/ /DIPERKIMHUB/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Ketua : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Anggota :
1. KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN
3. KEPALA SEKSI ANGKUTAN
4. KEPALA SEKSI LALU LINTAS
5. KEPALA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
6. KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
7. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
8. JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
9. JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
10. JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 29 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN

FANI HENDRA SAPUTRA, S.SI.T.,M.H.
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP 198401312006041005

SK IKU TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
Jalan Tisan Puspa 4 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon / Fax (0718) 4222991, Email dperkimhub@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR: 188.47/ 09 /DIPERKIMHUB/2024

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 188.47/31/DIPERKIMHUB/2023
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas;

b. bahwa untuk memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dalam pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan secara berkelanjutan, perlu adanya penyesuaian indikator kinerja utama beserta targetnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 188.47/31/DIPERKIMHUB/2023 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

1

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 188.47/ 09 /DIPERKIMHUB/2024
Tanggal : 02 September 2024

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2021—2026

B. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	26,18 Ha	28,18 Ha	30,18 Ha	35,22 Ha	37,22 Ha
3	Persentase rumah layak huni	96,49%	96,89%	97,50%	98,35 %	98,37%
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	58,54%	63,41%	68,29%	68,29%	73,17%
5	Rasio kejadiaan kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	35,00 Rasio	34,00 Rasio	33,00 Rasio	33,00 Rasio	32,00 Rasio
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	75,00 (Nilai)	78,00 (Nilai)	80,00 (Nilai)	80,00 (Nilai)	80,00 (Nilai)
7	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	80,00 (Nilai)	81,00 (Nilai)	82,00 (Nilai)	82,00 (Nilai)	82,00 (Nilai)

Ditetapkan di : Koba
Pada Tanggal : 02 September 2024

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

FANI HENDRA SAPUTRA, S.SiT.,M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 198401312006041005

7

POHON KINERJA TAHUN 2024

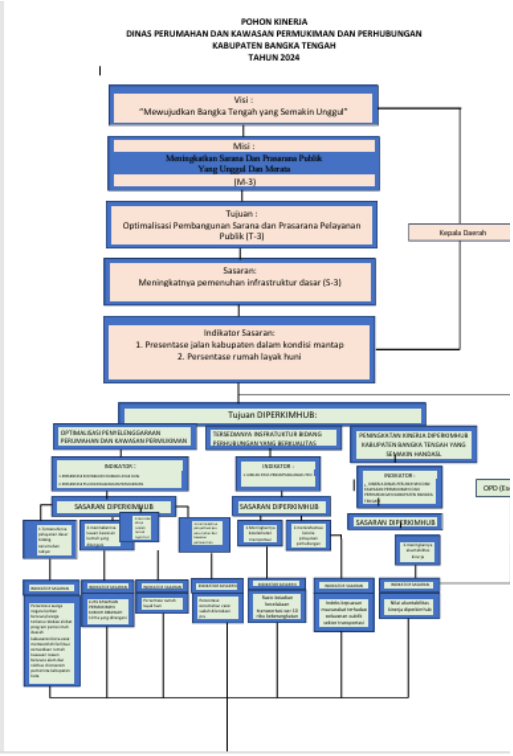

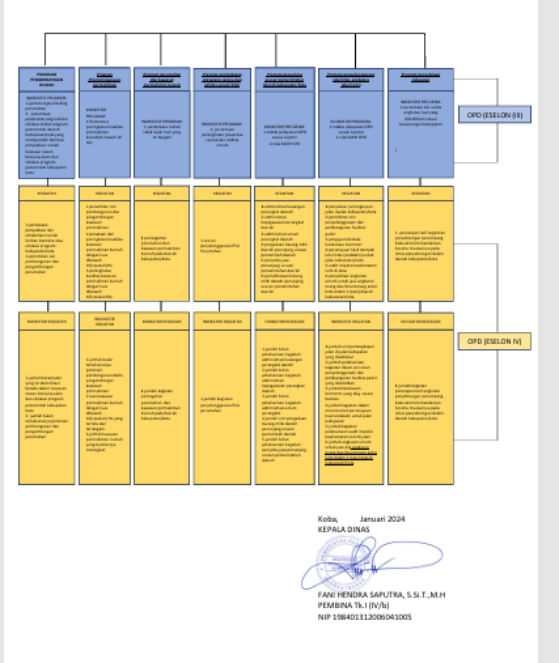

CASCADING TAHUN 2024

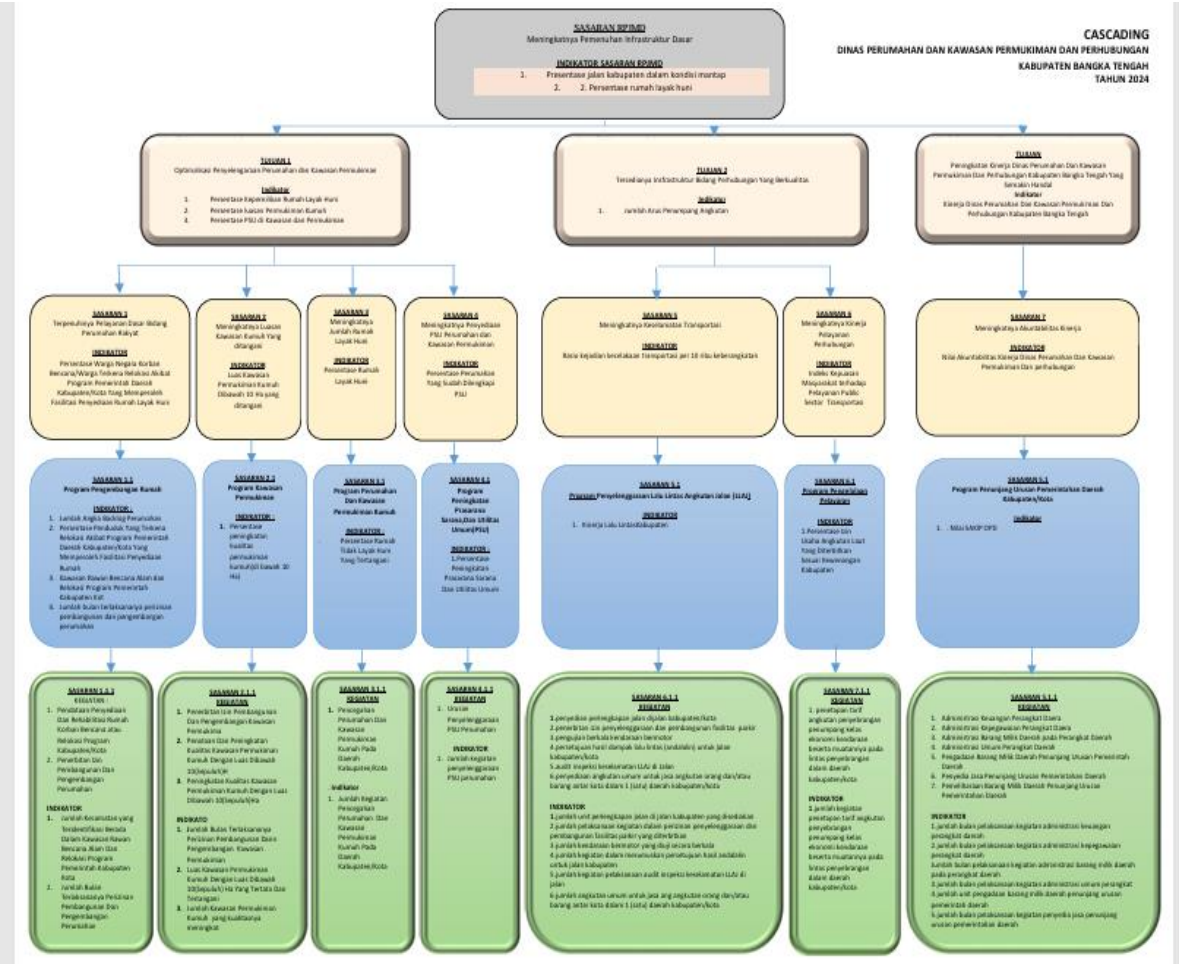

Koba, Januari 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KAB. BANGKA TENGAH

FANI HENDRA SAPUTRA, S.Si.T.,M.H
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP 198401312006041005

SK BUPATI PENETAPAN LOKASI KUMUH

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/152/DIPERKIMHUB/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka Tengah tentang Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,Kabupaten Bangka Barat danKabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

KELIMA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dengan penjabaran sebagai berikut:
a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
c. Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/556/DIPERKIMHUB/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal, 13 Januari 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

Tembusan:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/152/DIPERKIMHUB/2022
TANGGAL : 13 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	NAMA LOKASI KAWASAN	LUAS TOTAL (HA)	LUAS SUBTOTAL (HA)	LUAS KUMUH (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
					RT / RW	KEL/ DESA	KEC/ DISTRIK	JUMLAH (Jiwa/Ha)	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	Batu Belubang	9,62	9,62	9,62	Dusun Pantai (RT 03, RT 04, dan RT 013)	Batu Belubang	Pangkalanbaru	97	Rendah	106° 11' 9"	2° 9' 55"	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	Sungaiselan	4,02	4,02	2,24	RW 07(RT 02 dan RT 03)	Sungaiselan	Sungaiselan	105	Rendah	105°58'20"	2°23'10"	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
				1,78	RT 02-RW 08	Sungaiselan	Sungaiselan										
3	Kurau	20,10	9,36	2,61	Dusun I (RT 06, 07 dan 08)	Kurau Barat	Koba	121	Rendah	106°14'00"	2 ° 19'50"	23	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
				4,43	Dusun II (RT 01, 02 dan 03)	Kurau Barat	Koba										
				2,32	Dusun III (RT 04, 05 dan 09)	Kurau Barat	Koba										
			10,74	4,42	Dusun I (RT 01, 02, 03, 04 dan 05)	Kurau	Koba										
				6,32	Dusun II (RT 06, 07, 08, 09 dan 10)	Kurau	Koba										
Total Luas		33,74															

Ditetapkan di Koba
Padatanggal, 13 Januari 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

SERTIFIKAT AKREDITASI B

UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR :

Sertifikat Nomor : 1471/SM.304/DRJD/2020

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SERTIFIKAT AKREDITASI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4944/AJ.502/DRJD/2020 tanggal 21 Oktober 2020 menyatakan bahwa :

Nama UPUBKB : UPT PKB DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
Alamat : Jl. Titian Puspa 4, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah

Terakreditasi dengan klasifikasi :

AKREDITASI B

Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 4 (empat) tahun, sejak tanggal **21 Oktober 2020** sampai dengan **21 Oktober 2024.**

Jakarta, 22 Oktober 2020
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si

SERTIFIKAT PENDATAAN PERUMAHAN TERPADU TAHUN 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA :

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Berperan Aktif dalam Pendataan Perumahan Terpadu Tahun 2022
Di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang, 20 Maret 2023
Kepala Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan
Sumatera V

Ir. JOHNNY RAKHMAN, DIPL.E.ENG.
NIP. NIP. 19670208 199803 1 002